



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2023

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

Jl. Tanjung Ria No. 98 Base G

Telp. (0967) 541248 - Fax. (0967) 541045

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

pt-jayapura.go.id
[pengadilantinggijayapura](https://www.youtube.com/channel/UC...)

[ptjayapura](https://www.instagram.com/ptjayapura)
[Pengadilan Tinggi Jayapura](https://www.facebook.com/PengadilanTinggiJayapura)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diselesaikan dengan baik.



Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini merupakan gambaran hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam pelaksanaan penyelesaian perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum selama tahun 2023. Laporan ini juga merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan berbagai tugas dan fungsi serta kewajibannya.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini masih belum sempurna, dan demi peningkatan kualitas penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan di tahun mendatang, segala kritik, rekomendasi, dan saran konstruktif dari para pengguna laporan ini sangat diharapkan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 Pengadilan Tinggi Jayapura ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kami, serta sebagai bahan evaluasi dan pengawasan demi peningkatan kinerja seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Jayapura dalam melaksanakan pelayanan publik yang prima pada masa yang akan datang. Semoga bermanfaat.

Jayapura, 22 Januari 2024

Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura,

Amin Sutikno, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I. Pendahuluan	1
BAB II. Keadaan Perkara di Peradilan Umum	9
A. Keadaan Perkara	9
B. Penyelesaian Perkara	13
C. Akreditasi Penjaminan Mutu	22
BAB III. Sumber Daya Manusia	25
1. Mutasi	31
2. Promosi	33
3. Pemberhentian dan Pensiun	34
4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis Yang Mengikuti Diklat)	35
BAB IV. Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	42
A. Pengelolaan Keuangan	42
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	44
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	60
BAB V. Peningkatan Pelayanan Publik	69
A. Akreditasi Penjaminan Mutu	69
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	70
C. Inovasi Pelayanan Publik	73
BAB VI. Pengawasan	84
A. Internal	84
B. Evaluasi	88
BAB VII. Penutup	91
A. Kesimpulan	91
B. Rekomendasi	91

BAB I PENDAHULUAN

A. Sejarah Pengadilan Tinggi Jayapura

Pengadilan Tinggi Jayapura merupakan Peradilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, dan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Pengadilan Tinggi Jayapura dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden (PenPres) Nomor 12 Tahun 1963 tanggal 22 Mei 1963, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1963. Dahulu bernama Pengadilan Tinggi Irian Barat, berkedudukan di Hollandia (Jayapura) yang membawahi seluruh Pengadilan Negeri di wilayah Provinsi Irian Barat. Seiring perkembangan waktu nama Pengadilan Tinggi Irian Barat tersebut terakhir berubah dengan nama Pengadilan Tinggi Jayapura.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, maka tantangan Pengadilan Tinggi Jayapura sangatlah berat. Lembaga peradilan sebagai salah satu pilar demokrasi dituntut untuk mengambil peran dalam konteks ini. Pengadilan Tinggi Jayapura selaku Kawal Depan (Voorpost) Mahkamah Agung RI senantiasa menjaga kemandirian Peradilan dan meningkatkan profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan Tinggi Jayapura juga membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasal 3 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).

Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan Provinsi baru di Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan serta pada tanggal 8 Desember 2022 disahkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu telah lebih dahulu disahkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, maka wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 4 (empat) Provinsi yaitu Papua, Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan dengan pembagian kabupaten/kota sebagai berikut:



Provinsi Papua	Provinsi Papua Selatan	Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua Pegunungan
<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Biak Numfor • Kabupaten Jayapura • Kabupaten Keerom • Kabupaten Kepulauan Yapen • Kabupaten Memberamo Raya • Kabupaten Sarmi • Kabupaten Supiori • Kabupaten Waropen • Kota Jayapura 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Asmat • Kabupaten Boven Digoel • Kabupaten Mappi • Kabupaten Merauke 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Deiyai • Kabupaten Dogiyai • Kabupaten Intan Jaya • Kabupaten Mimika • Kabupaten Nabire • Kabupaten Paniai • Kabupaten Puncak • Kabupaten Puncak Jaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Jayawijaya • Kabupaten Lanny Jaya • Kabupaten Memberamo Tengah • Kabupaten Nduga • Kabupaten Pegunungan Bintang • Kabupaten Tolikara • Kabupaten Yahukimo • Kabupaten Yalimo

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara serta berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 337/KMA/SK/XI/2022 Tentang Penetapan Tanggal dan Tempat Peresmian Operasional Tiga Belas Pengadilan Tingkat Banding Baru dan Tiga Puluh Delapan Gedung Pengadilan Tingkat Pertama yang isinya menetapkan tanggal operasional Pengadilan Tinggi Papua Barat pada tanggal 5 Desember 2022.

Dengan beroperasinya Pengadilan Tinggi Papua Barat maka sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Pengadilan Tinggi Jayapura membawahi 7 (tujuh) Pengadilan Tingkat Pertama, yaitu :

No	Nama Pengadilan	Kelas
1.	Pengadilan Negeri Jayapura	IA
2.	Pengadilan Negeri Merauke	II
3.	Pengadilan Negeri Wamena	II
4.	Pengadilan Negeri Biak	II
5.	Pengadilan Negeri Serui	II
6.	Pengadilan Negeri Nabire	II
7.	Pengadilan Negeri Kota Timika	II

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Tinggi Jayapura bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara pada tingkat banding yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat banding.

- **Tugas Pokok**

Tugas Pokok Pengadilan adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sebagaimana yang ditentukan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya.

- **Kewenangan**

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Tinggi Jayapura disertai kewenangan lain berdasarkan pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, yaitu dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, apabila diminta. Pemberian keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum, dikecualikan dalam hal-hal yang berhubungan dengan perkara yang sedang atau akan diperiksa di Pengadilan. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

Dalam rangka mewujudkan tugas pokok, diperlukan perangkat sarana serta prasarana pendukung lainnya, yang secara organisatoris tersusun dalam bentuk Struktur Organisasi Pengadilan, yang akan menjabarkan lebih lanjut pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas dalam bentuk *job description* (pembagian tugas) masing-masing aparatur.

Pencapaian pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura tidak saja berkaitan dengan bidang kepaniteraan saja yang menangani urusan administrasi perkara, tetapi sangat bergantung pula kepada bidang kesekretariatan yang akan menunjang tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi umum.

Pengadilan Tinggi Jayapura dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut :

- **Fungsi**

- 1) Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni fungsi untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, yang meliputi kewenangan mengadili perkara pada tingkat banding dan kewenangan mengadili ditingkat pertama dan terakhir menyangkut masalah sengketa mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya.
- 2) Fungsi Pembinaan, yakni melakukan pembinaan, baik menyangkut teknis yustisial maupun teknis administrasi peradilan maupun administrasi umum secara berkala ataupun dalam waktu-waktu yang dipandang perlu.
- 3) Fungsi Pengawasan, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas secara menyeluruh kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura, baik secara reguler maupun untuk waktu-waktu yang diperlukan untuk dijadikan bahan evaluasi atas kinerja masing-masing Pengadilan Negeri bersangkutan;
- 4) Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian yang mendukung pelaksanaan tugas pokok yang menyangkut teknis peradilan maupun administrasi peradilan.

C. Visi, Misi dan Tujuan

- **Visi**

Visi merupakan cara pandang jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Visi Pengadilan Tinggi Jayapura mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA PENGADILAN
TINGGI JAYAPURA YANG AGUNG**

- **Misi**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :



• **Tujuan**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Jayapura. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Tinggi Jayapura.
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Jayapura.

Adapun motto Pengadilan Tinggi Jayapura adalah :

Membangun SDM Berintegritas
Memberikan Pelayanan Berkualitas

D. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
 - b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
 - c. Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

Indikator untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :

- a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.

E. Program Kerja

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan program kerja yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan didukung dengan ketersediaan anggaran dalam DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Program tersebut selanjutnya dirinci dalam bentuk kegiatan yang tertuang lebih detail pada Rincian Kertas Kerja (RKK) DIPA Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun program kerja tersebut adalah :

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.
2. Program Dukungan Manajemen

F. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, struktur organisasi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut:



BAB II KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

1) Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Keadaan perkara tahun 2023 pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Masuk Tahun 2023				
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI	Perikanan
1	PN Jayapura	9738	1243	40	18	
2	PN Wamena	79	23			
3	PN Merauke	753	367			0
4	PN Biak	93	163			
5	PN Nabire	138	214			
6	PN Serui	74	71			
7	PN Timika	145	107			
Total		11020	2188	40	18	0

2) Keadaan Perkara Tingkat Banding

Tugas pokok Pengadilan Tinggi Jayapura yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

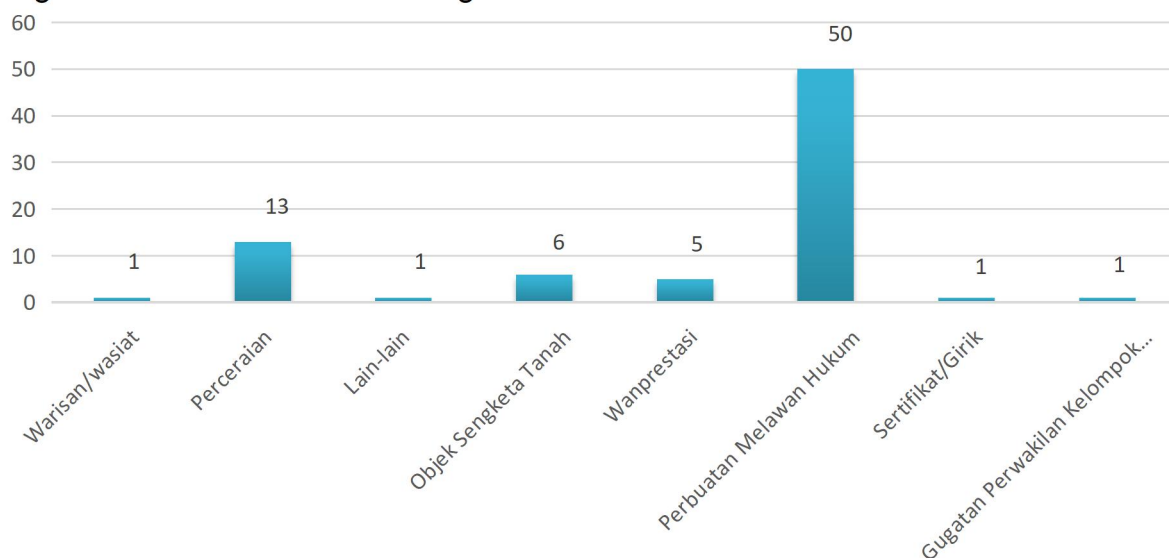
Rincian Perkara Perdata tahun 2023 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Perdata Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2023

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara Masuk
1	Warisan/wasiat	1
2	Perceraian	13
3	Lain-lain	1
4	Objek Sengketa Tanah	6
5	Wanprestasi	5

6	Perbuatan Melawan Hukum	50
7	Sertifikat/Girik	1
8	Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	1
Total		78

Diagram Perkara Perdata Banding Masuk Tahun 2023



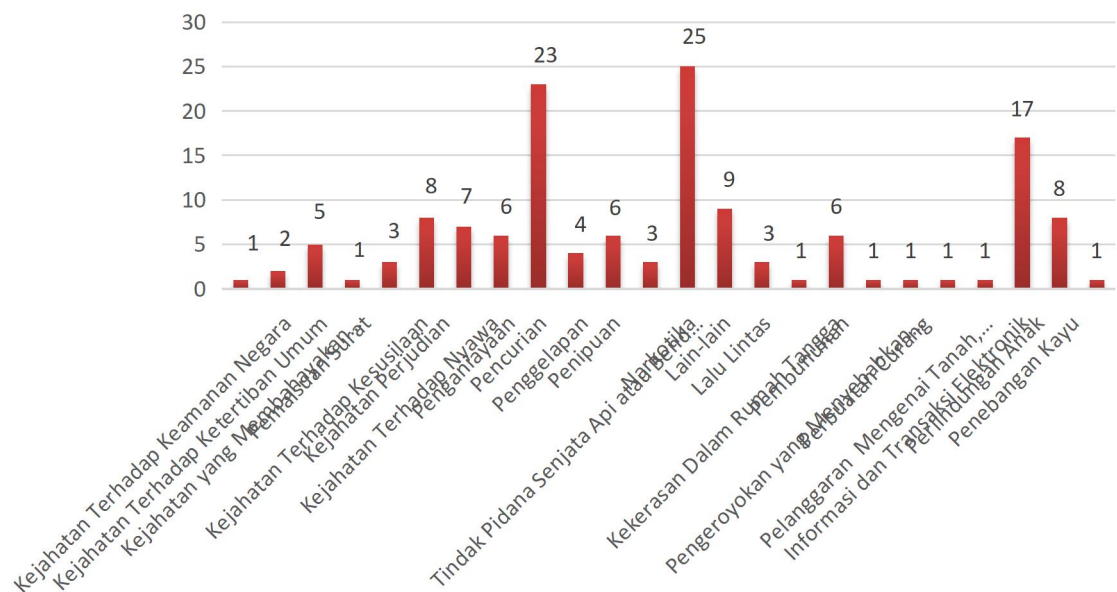
Rincian Perkara Pidana tahun 2023 menurut klasifikasi perkara pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Banding Berdasarkan Klasifikasi Perkara Tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
1	Kejahatan Terhadap Keamanan Negara	1
2	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum	2
3	Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang	5
4	Pemalsuan Surat	1
5	Kejahatan Terhadap Kesusilaan	3
6	Kejahatan Perjudian	8
7	Kejahatan Terhadap Nyawa	7
8	Penganiayaan	6
9	Pencurian	23
10	Penggelapan	4
11	Penipuan	6
12	Tindak Pidana Senjata Api atau Benda Tajam	3

13	Narkotika	25
14	Lain-lain	9
15	Lalu Lintas	3
16	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1
17	Pembunuhan	6
18	Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian	1
19	Perbuatan Curang	1
20	Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman dan Pekarangan	1
21	Informasi dan Transaksi Elektronik	1
23	Perlindungan Anak	17
24	Penebangan Kayu	8
25	Hal-hal yang Mengakibatkan Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1
Total		143

Diagram Perkara Pidana Banding Masuk Tahun 2023



Rincian Perkara Tindak Pidana Korupsi tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel. Perkara Pidana Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahun 2023

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah Perkara Masuk
----	---------------------	----------------------

1	Kerugian Keuangan Negara	4
2	Suap Menyuap	0
3	Penggelapan dalam Jabatan	0
4	Perbuatan Pemerasan	0
5	Perbuatan Curang	0
6	Benturan Kepentingan dalam Pengadaan	0
7	Gratifikasi	0
Total		4

Diagram Perkara Tindak Pidana Korupsi Masuk Tahun 2023



3) Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

Perkara Tingkat Kasasi pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara Kasasi			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	9	29	8	16
2	PN Wamena	0	0		
3	PN Merauke	4	6		
4	PN Biak	6	3		
5	PN Nabire	1	2		
6	PN Serui	2	0		
7	PN Timika	14	7		
Total		36	47	8	16

4) Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

No	Satker	Jumlah Perkara PK			
		Pidana	Perdata	Tipikor	PHI
1	PN Jayapura	0	6	0	0
2	PN Wamena	0	0		
3	PN Merauke	0	0		
4	PN Biak	1	0		
5	PN Nabire	0	1		
6	PN Serui	0	0		
7	PN Timika	0	0		
Total		1	7		

B. PENYELESAIAN PERKARA

1) Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Selama tahun 2023 jumlah sisa Perkara yang diputus pada Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2023 Pada Pengadilan Tinggi Jayapura :

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Perdata	9	78	78	9
2	Pidana	13	135	126	22
3	Pidana Anak	0	8	8	0
4	Perikanan	0	0	0	0
5	Tipikor	0	4	4	0
Total		22	225	216	31

Diagram Sisa Perkara Banding yang diputus Tahun 2023 pada Pengadilan Tinggi Jayapura



Adapun wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura meliputi 7 (Tujuh) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura, yaitu :

- 1) Pengadilan Negeri Jayapura
- 2) Pengadilan Negeri Wamena
- 3) Pengadilan Negeri Merauke
- 4) Pengadilan Negeri Biak
- 5) Pengadilan Negeri Nabire
- 6) Pengadilan Negeri Serui
- 7) Pengadilan Negeri Kota Timika

Rekapitulasi jumlah perkara di 7 (Tujuh) Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada tahun 2023, sebagaimana data tabel dibawah ini:

Dalam tahun 2023, rekapitulasi sisa Perkara Pidana pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2022 : 310 perkara
- Masuk : 11000 perkara
- Putus : 11042 perkara
- Sisa : 268 perkara

Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	165	9738	9745	158
2	Pengadilan Negeri Wamena	9	79	81	7
3	Pengadilan Negeri Merauke	37	753	751	39
4	Pengadilan Negeri Biak	24	81	98	7
5	Pengadilan Negeri Nabire	30	138	146	22
6	Pengadilan Negeri Serui	7	66	72	1
7	Pengadilan Negeri Timika	38	145	149	34
Total		310	11000	11042	268

Grafik sisa Perkara Pidana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	0	37	37	0
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	4	4	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	0	35	35	0
4	Pengadilan Negeri Biak	0	12	12	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	0	3	3	0
6	Pengadilan Negeri Serui	0	8	8	0
7	Pengadilan Negeri Timika	0	4	4	0
Total		0	103	103	0

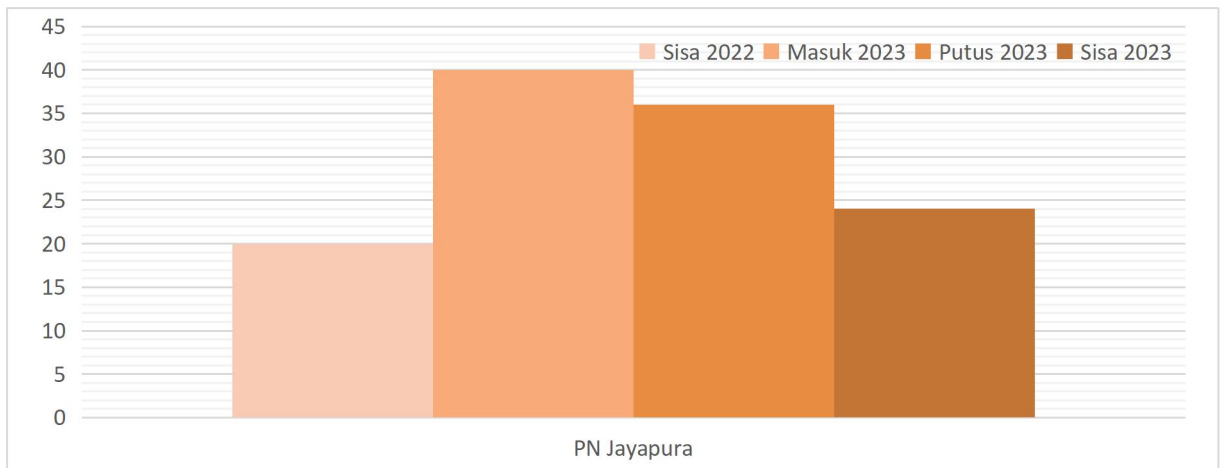
Grafik sisa Perkara Pidana Anak Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	20	40	36	24
	Total	20	40	36	24

Grafik sisa Perkara Tindak Pidana Korupsi Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Perikanan

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Merauke	0	0	0	0
	Total	0	0	0	0

Grafik sisa Perkara Perikanan



Dalam tahun 2023, rekapitulasi sisa Perkara Perdata pada Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

- Sisa 2022 : 162 perkara
- Masuk : 648 perkara
- Putus : 577 perkara
- Cabut : 32 perkara
- Sisa : 207 perkara

Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	90	294	286	7	91
2	Pengadilan Negeri Wamena	5	20	18	0	7
3	Pengadilan Negeri Merauke	27	104	71	10	50
4	Pengadilan Negeri Biak	8	40	40	1	7
5	Pengadilan Negeri Nabire	7	72	55	6	18
6	Pengadilan Negeri Serui	1	11	7	0	5
7	Pengadilan Negeri Timika	22	107	92	8	29
Total		160	648	569	32	207

Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi Sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Satker	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	5	926	919	0	12
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	65	63	1	1
3	Pengadilan Negeri Merauke	0	261	251	10	0
4	Pengadilan Negeri Biak	0	117	116	1	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	2	132	127	7	0
6	Pengadilan Negeri Serui	0	49	49	0	0
7	Pengadilan Negeri Timika	2	215	195	22	0
Total		9	1765	1720	41	13

Grafik sisa Perkara Perdata Permohonan Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Cabut	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	7	20	27	0	0
2	Pengadilan Negeri Wamena	0	3	3	0	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	2	2	4	0	0
4	Pengadilan Negeri Biak	0	3	2	1	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	3	10	12	0	1
6	Pengadilan Negeri Serui	0	24	23	0	1
7	Pengadilan Negeri Timika	0	10	9	0	1
Total		12	72	80	1	3

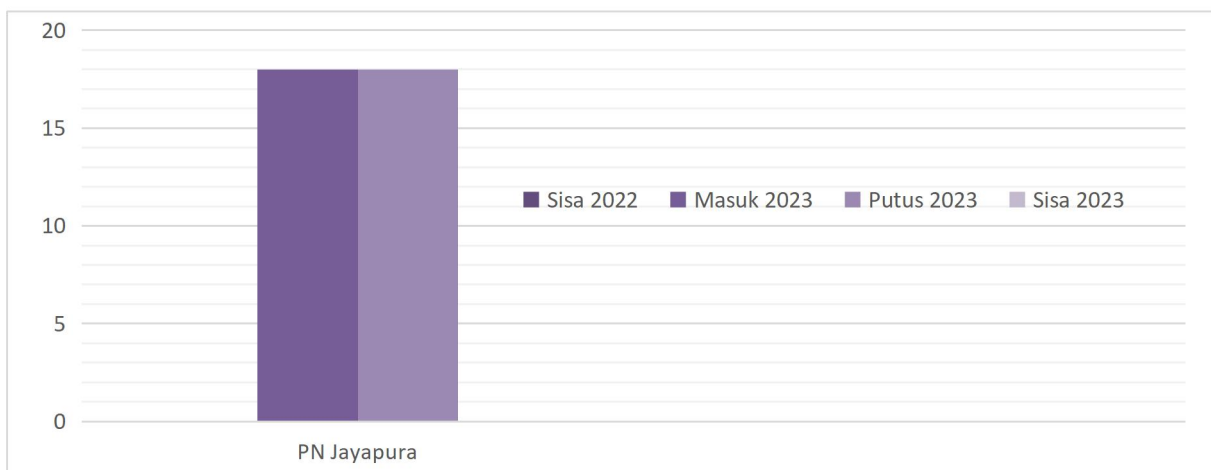
Grafik sisa Perkara Perdata Gugatan Sederhana Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura



Tabel Rekapitulasi sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)

No	Jenis Perkara	Sisa 2022	Masuk 2023	Putus 2023	Sisa 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	0	18	18	0
Total		0	18	18	0

Grafik sisa Perkara Hubungan Industrial (PHI)



2) Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

Adapun Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu tahun 2023 di Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 3 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (lebih dari 3 Bulan)
1	Perdata	87	78	0
2	Pidana	148	125	1
3	Pidana Anak	8	8	0
4	Perikanan	0	0	0
5	Tipikor	4	4	0
Total		247	215	1

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Putus Tepat Waktu (Kurang dari 5 Bulan)	Jumlah Perkara yang Putus Tidak Tepat Waktu (Lebih dari 5 Bulan)
1	Pengadilan Negeri Jayapura	1915	153
2	Pengadilan Negeri Wamena	99	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	313	31
4	Pengadilan Negeri Biak	119	0
5	Pengadilan Negeri Nabire	268	75

6	Pengadilan Negeri Serui	131	4
7	Pengadilan Negeri Timika	417	13
Total		3262	276

3) Jumlah Perkara Yang Tidak mengajukan Upaya Hukum

Tabel Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, PK di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Yang Putus	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK
1	Pengadilan Negeri Jayapura	2068	1931
2	Pengadilan Negeri Wamena	99	73
3	Pengadilan Negeri Merauke	346	335
4	Pengadilan Negeri Biak	150	110
5	Pengadilan Negeri Nabire	343	322
6	Pengadilan Negeri Serui	120	106
7	Pengadilan Negeri Timika	475	436
Total		3601	3313

4) Jumlah Perkara Yang Berhasil di Mediasi

Adapun jumlah perkara yang berhasil di Mediasi tahun 2023 di Wilayah Pengadilan tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara yang Dimediasi tahun 2023	Jumlah Perkara yang Berhasil di Mediasi
1	Pengadilan Negeri Jayapura	232	9
2	Pengadilan Negeri Wamena	25	0
3	Pengadilan Negeri Merauke	55	5
4	Pengadilan Negeri Biak	17	1
5	Pengadilan Negeri Nabire	20	2
6	Pengadilan Negeri Serui	4	0
7	Pengadilan Negeri Timika	45	3
Total		398	20

5) Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Adapun jumlah perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi tahun 2023 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Perkara Anak tahun 2022	Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi Tahun 2023
1	Pengadilan Negeri Jayapura	37	0
2	Pengadilan Negeri Wamena	4	4
3	Pengadilan Negeri Merauke	35	0
4	Pengadilan Negeri Biak	12	1
5	Pengadilan Negeri Nabire	3	1
6	Pengadilan Negeri Serui	10	1
7	Pengadilan Negeri Timika	4	0
Total		105	7

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

1) Posbakum (Pos Bantuan Hukum) Satker Yang Mendapat Alokasi Dan Realisasi Anggaran

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Dalam tahun anggaran 2023 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan POSBAKUM kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk POSBAKUM dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran
PN JAYAPURA	Rp. 40.800.000,-	Rp. 40.600.000,-
PN WAMENA	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-

PN MERAUKE	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN BIAK	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN NABIRE	Rp. 12.000.000,-	Rp. 12.000.000,-
PN SERUI	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-
PN TIMIKA	Rp. 31.200.000,-	Rp. 31.200.000,-

2) Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu

Sidang keliling/pelayanan terpadu dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilaksanakan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan melaksanakan sidang di tempat / di luar gedung Pengadilan / Zitting Plaatz.

Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang/penyelesaian perkara diluar gedung Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan peradilan kepada masyarakat dan menyelesaikan perkara dengan biaya ringan (murah). Dalam tahun anggaran 2023 Dirjen Badan Peradilan Umum telah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan Sidang keliling kepada Pengadilan Tingkat pertama. Berikut adalah Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah mendapatkan alokasi anggaran untuk Sidang diluar gedung Pengadilan dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Satker	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggggaran
PN JAYAPURA		
PN WAMENA		
PN MERAUKE	Rp. 170.000.000,-	Rp. 169.985.872,-
PN BIAK		
PN NABIRE		
PN SERUI		
PN TIMIKA		

3) Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum, dinyatakan bahwa Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara Cuma-Cuma dengan dibiayai oleh negara melalui DIPA Pengadilan. Yang

berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis (miskin).

Dalam tahun anggaran 2023 seluruh satuan kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk perkara prodeo.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung kepada kualitas, integritas, dan kinerja individu yang bekerja didalamnya, apabila integritas dan kinerja individu yang bekerja diorganisasi tersebut tidak berkualitas dan profesional, maka akan menjadi kendala dalam menjalankan suatu sistem yang berorientasi hasil (*result oriented*) dan berbasis pada kinerja. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan suatu organisasi tersebut dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mempunyai integritas, dedikasi yang tinggi dan mempunyai komitmen, semangat serta konsistensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena suatu sistem yang berbasis kinerja hanya akan menghasilkan output yang memuaskan apabila sistem tersebut dikendalikan dan dikelola oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam rangka mensinergikan program pengembangan SDM yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan suatu Pengadilan yang Unggul (*Court Excellence*) dan suatu Badan Peradilan Indonesia yang Agung maka Pengadilan Tinggi Jayapura mencoba menuangkan misi dan agenda perubahan dalam bentuk peningkatan kapasitas kepemimpinan dan pengelolaan organisasi. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Jayapura telah senantiasa meningkatkan kualitas dan profesionalisme bagi Hakim, Pejabat Struktural, Fungsional, maupun seluruh staf. Adapun pembinaan yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas dan profesionalisme diantaranya ialah:

a. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

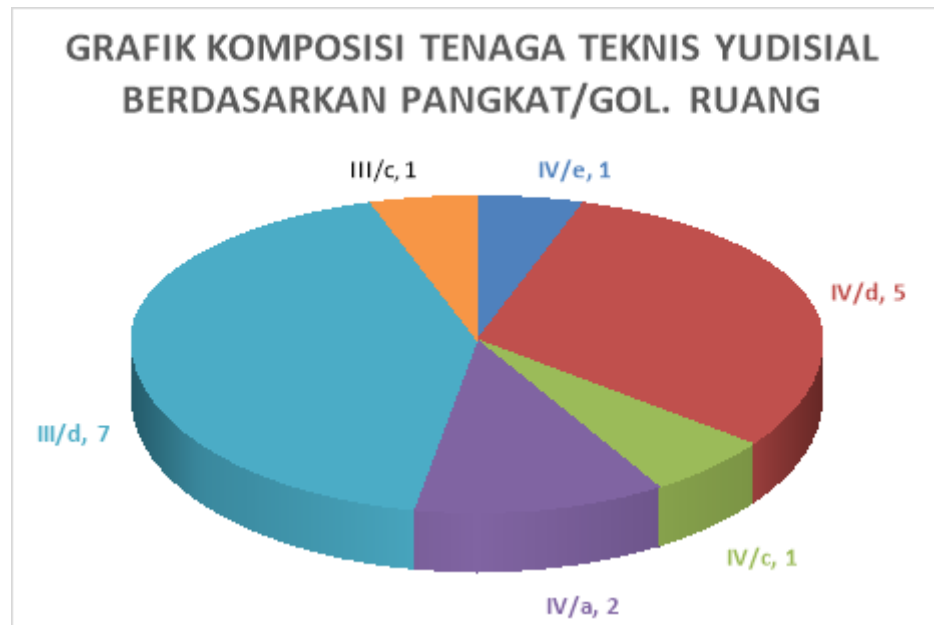
Komposisi Sumber Daya Manusia di Bidang Teknis Yudisial di Pengadilan Tinggi Jayapura menurut keadaan 31 Desember 2023, yaitu:

Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	AMIN SUTIKNO, S.H., M.H. 196008011986121001	Pembina Utama IV/e	KETUA
2.	ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. 196306111992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
3.	Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. 196303311989031002	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
4.	ARI WIDODO, S.H. 196307011992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
5.	TIARES SIRAIT, S.H, M.H. 196409091992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
6.	SIGIT PANGUDIANTO, S.H,M.H. 196508051992121001	Pembina Utama Madya IV/d	Hakim Tinggi
7.	Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, S.H., M.H. 197005291995031002	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
8.	Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H. 1967042702201104002	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
9.	Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. 1964121602201104021	-	Hakim Ad Hoc Tipikor
10.	DAHLAN., S.E., S.H. 196512311990031034	Pembina Utama Muda IV/c	Panitera
11.	Hj. SUYATMI, S.H., M.H. 196909131989032002	Pembina IV/a	Panmud Tipikor
12.	TOMMY KENEDY I MEDELLU, S.H. 196208171983031004	Penata Tingkat I III/d	Panmud Perdata
13	SIHTWIYANTI, S.H., M.H. 196702031992032001	Pembina IV/a	Panmud Pidana
14	ADOLF FORDATKOSSU, S.H 196204051982031003	Penata Tingkat I III/d	Panmud Hukum
15	MUHAMMAD ROFIQ, S.H. 196204031985031006	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
16	ELSI MEBRI, S.H. 196208121990032003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
17	DEHEFSEN BOROLLA, S.H. 196112141983031003	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
18	ANY FITRIYATI, S.H. 197410071993032001	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti
19	BUDIMAN, S.H 196208301993031001	Penata III/c	Panitera Pengganti
20	SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos. 196705151991031009	Penata Tingkat I III/d	Panitera Pengganti

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

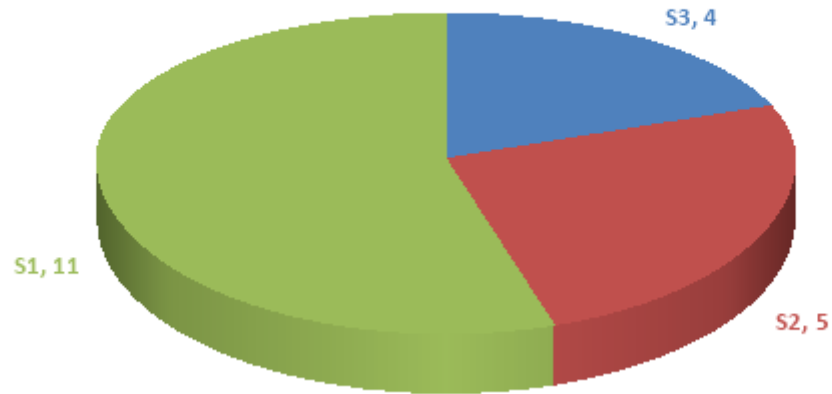
- Pembina Utama (IV/e) : 1 orang
- Pembina Madya (IV/d) : 5 orang
- Pembina Utama Muda (IV/c) : 1 orang
- Pembina (IV/a) : 2 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 7 orang
- Penata (III/c) : 1 orang



Selain itu, komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Doktor (S3) : 4 orang
- Magister (S2) : 5 orang
- Sarjana (S1) : 11 orang
- D3 : - orang
- SMA/SLTA : - orang

**GRAFIK KOMPOSISI TENAGA TEKNIS YUDISIAL
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN**



b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial yang mendukung pelaksanaan administrasi di Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2023 yaitu:

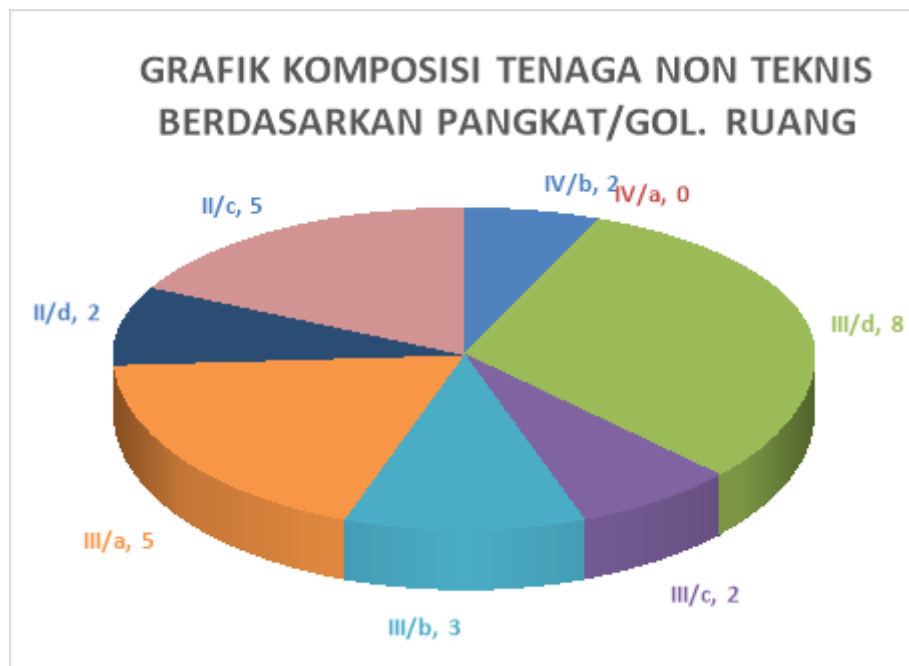
Tabel. Komposisi Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial

No	Nama NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan
1.	MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H. 197210211993031002	Pembina Tingkat I IV/b	Sekretaris
2.	NURMAYANI, S.E. 198012102005022001	Pembina Tingkat I IV/b	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian
3.	HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, S.T. 198509022009122004	Penata Tingkat I III/d	Kabag Umum dan Keuangan
4.	DIANA BIAN, S.E. 196708071992032009	Penata Tingkat I III/d I	Kasubag Keuangan dan Pelaporan
5.	AFRI YUHARA, S.Kom. 197804042009041005	Penata Tingkat I III/d	Kasubag Tata Usaha dan Rumah Tangga
6.	YENY DARMAYANI, S.Kom. 198212042009042003	Penata Tingkat I III/d I	Kasubag Kepegawaian dan TI
7.	INDRAWAN RAJAB, S.Sos. 198811022019031003	Penata Muda Tk. I III/b	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
8.	ERNA IRIANI, S.E., S.H. 198103162009122001	Penata Tingkat I III/d	Klerek - Analisis Perkara Peradilan
9.	ALFONIUS RUDIYANTO SAGRIM, SH 198308302010041001	Penata Tingkat I III/d I	Klerek - Analisis Perkara Peradilan

10.	IRDA PALEPONG, S.H. 198704022006042001	Penata Tingkat I III/d	Klerek - Analis Perkara Peradilan
11.	YUSMIATI, S.E. 198109232009042006	Penata Tingkat I III/d	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
12.	HENNY SARA SARCE WAKUM, S.H. 197611231997122001	Penata III/c	Klerek - Analis Perkara Peradilan
13.	ROLITA SIRAIT, S.H., M.H. 198702142006042002	Penata III/c	Klerek - Analis Perkara Peradilan
14.	LISKEN PARDOSI, S.H. 197611052009042005	Penata Muda Tk. I III/b	Klerek - Analis Perkara Peradilan
15.	LILA FITRIZA, S.H. 198310112011012007	Penata Muda Tk. I III/b	Operator - Penata Layanan Operasional
16.	FREDERIK SELAN, S.H. 198612032012121005	Penata Muda III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan
17.	MARTHA CHRISTINA KABES, S.E 199403262022032011	Penata Muda III/a	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
18.	BAGUS WAHYU KURNIAWAN, S.E. 199407302020121008	Penata Muda III/a	Operator - Penata Layanan Operasional
19.	AHMAD KHOIRUL ANAM, S.E. 199404012020121009	Penata Muda III/a	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
20.	ARIF NUGRAHA, SH 199609062022031005	Penata Muda III/a	Klerek - Analis Perkara Peradilan
21.	YUSUF RYAN FAJAR 198906162009121001	Pengatur Tk. I II/d	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran
22.	ADITYA PUTRA SETIA SINAGA, A.Md. 199604192019041001	Pengatur Tk. I II/d	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana
23.	VERLA REMI JULIA, A.md.A.P 199707222022032017	Pengatur II/c	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
24.	HOSEA GRIFFIN WISANGGENI, A.Md. 199803212020121001	Pengatur II/c	Klerek - Pengolah Data dan Informasi
25.	SABRI, A.Md. 199307242022031006	Pengatur II/c	Klerek - Pengolah Data dan Informasi

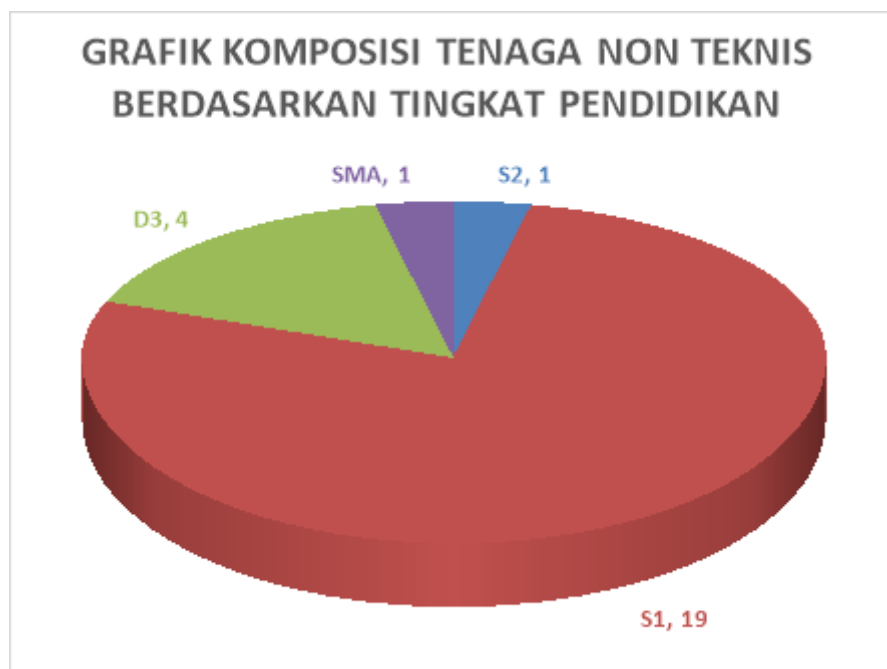
Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa komposisi SDM tenaga teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan pangkat/golongan ruang sebagai berikut :

- Pembina Tk. I (IV/b) : 2 orang
- Pembina (IV/a) : 0 orang
- Penata Tk. I (III/d) : 8 orang
- Penata (III/c) : 2 orang
- Penata Muda Tk. I (III/b) : 3 orang
- Penata Muda (III/a) : 5 orang
- Pegatur Tk.I (II/d) : 2 orang
- Pengatur (II/c) : 3 orang



Selain itu, komposisi SDM tenaga non teknis yudisial Pengadilan Tinggi Jayapura berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

- Magister (S2) : 1 orang
- Sarjana (S1) : 19 orang
- Diploma (D3) : 4 orang
- SMA/Sederajat : 1 orang



1. Mutasi

Pemutasian (alih tempat dan alih tugas) dilaksanakan untuk kepentingan dinas, maupun atas pertimbangan pribadi/keluarga. Mutasi dalam arti peralihan tugas diadakan untuk memberikan pengalaman regional maupun nasional.

Adapun Mutasi di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura selama tahun 2023, yaitu:

a. Promosi dan Mutasi Dalam Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1	SIHTWIYANTI, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana PN Jayapura	Panitera Muda Pidana PT Jayapura
2	SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.	Panitera Muda Pidana PN Timika	Panitera Pengganti PT Jayapura
3	HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, S.T.	Kasubag Rencana Program dan Anggaran PT Jayapura	Kabag Umum dan Keuangan PT Jayapura
4	YENY DARMAYANI, S.Kom.	Analisis Protokol PT Jayapura	Kasubag Kepegawaian dan TI PT Jayapura
5	AHMAD KHOIRUL ANAM, S.E.	Bendahara Tingkat Pertama PN Timika	Pengelola Data PT Jayapura
6	PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Timika	Ketua PN Timika
7	DEWI SETYARINI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Biak	Panitera Pengganti PN Biak
8	IVALDO FILLOL NAINGGOLAN, S.E., S.H.	Kasubag PTIP PN Merauke	Sekretaris PN Merauke
9	PAHALA M. RIAN TO HUTAGALUNG, S.H.	Panitera Pengganti PN Merauke	Panmud Pidana PN Merauke
10	AGUNG MARPAUNG, S.H.	Jurusita PN Merauke	Panitera Pengganti PN Merauke
11	MARTHA TASIK, S.IP.	Panmud Hukum PN Nabire	Panmud Pidana PN Nabire
12	ZAINAL, S.H.	Panmud Pidana PN Nabire	Panmud Perdata PN Nabire
13	MAXI RONALDO MENANTI, S.AP.	Analisis Tata Laksana PN Nabire	Kasubag Umum dan Keuangan PN Nabire
14	SRI HAJERA, S.H.	Jurusita Pengganti PN Serui	Kasubag Umum dan Keuangan PN Serui
15	BUDDI, S.H.	Panitera PN Serui	Panitera PN Timika
16	ADOLFIANA SUSANA WOTOS, S.I.P.	Analisis Tata Laksana PN Timika	Kasubag Kepegawaian, Ortala PN Timika
17	SULASTRI NUR AZA BUGIS, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Timika	Panitera Pengganti PN Timika
18	AGUSTINO EDWARD RIZAL, S.E., S.H.	Kasubag PTIP PN Wamena	Sekretaris PN Wamena

19	DEDY MUH. ARHAM, A.Md.Kom, S.A.B.	Analisis Perencanaan PN Wamena	Kasubbag PTIP PN Wamena
20	ARAFAH	Pengadministrasi Keuangan PN Wamena	Jurusita Pengganti PN Wamena

b. Promosi dan Mutasi Masuk Papua

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	AMIN SUTIKNO, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Jambi	Ketua PT Jayapura
2.	MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.	Sekretaris PA Kabupaten Malang	Sekretaris PT Jayapura
3.	JOHANA CAROLINA LEKBILA, S.IP, S.H.	Panitera PN Atambua	Panitera PN Jayapura
4.	RONALD LAUTERBOOM, S.H., M.H.	Hakim PN Sukhoharjo	Hakim PN Jayapura
5.	LIDIA AWINERO, S.H., M.H.	Hakim PN Tegal	Hakim PN Jayapura
6.	SALEMAN LATUPONO, S.H.,M.H.	Panmud Pidana PN Labuha	Panmud Pidana PN Jayapura
7.	DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.	Panmud Pidana PN Manokwari	Panitera PN Serui
8.	HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkal Pinang	Wakil Ketua PN Wamena

c. Promosi dan Mutasi Keluar Papua

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	ASLI GINTING, S.H., M.H.	Ketua PT Jayapura	Ketua PT Manado
2.	AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H.	Wakil Ketua PT Jayapura	Wakil Ketua PT Bangka Belitung
3.	BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum.	Hakim Utama PT Jayapura	Hakim Utama PT Palangkaraya
4.	PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H.	Hakim Utama Muda PT Jayapura	Hakim Utama Muda PT Manado
5.	ADI PRASETYO, S.H., M.H.	Hakim Non Palu PT Jayapura	Hakim PN Klaten
6.	RAHMAT HARTANTO, S.Psi.	Analisis Organisasi PT Jayapura	Analisis Organisasi PT Surabaya
7.	NUR ALQADRI, A.Md.	Pengelola Data PT Jayapura	Pengelola Data PT Makassar
8.	YAJID, S.H., M.H.	Ketua PN Timika	Wakil Ketua PN Sorong
9.	EDWIN TAPILATU, S.SOS.,SH	Panitera PN Timika	Panitera PN Fakfak
10.	IRWAN, S.H., M.H.	Panitera Pengganti PN Nabire	Panmud Pidana PN Belopa
11.	AKHMAD ZUMRONI, S.H.	Panmud Hukum PN Jayapura	Panitera Pengganti PN Tengerang

12.	SARMAIDA E.R.L. TOBING, S.H., M.H.	Hakim PN Timika	Hakim PN Menggala
-----	------------------------------------	-----------------	-------------------

2. Promosi

Selama tahun 2023, di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura telah terjadi promosi sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel Daftar Pelantikan Jabatan Tahun 2023

No	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru
1.	SIHTWIYANTI, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana PN Jayapura	Panitera Muda Pidana PT Jayapura
2.	SABUNGAN PAKPAHAN, S.Sos.	Panitera Muda Pidana PN Timika	Panitera Pengganti PT Jayapura
3.	HERNA DIAN PRIHATINY NAPAN, S.T.	Kasubag Rencana Program dan Anggaran PT Jayapura	Kabag Umum dan Keuangan PT Jayapura
4.	YENY DARMA YANI, S.Kom.	Analisis Protokol PT Jayapura	Kasubag Kepegawaian dan TI PT Jayapura
5.	PUTU MAHENDRA, S.H., M.H.	Wakil Ketua PN Timika	Ketua PN Timika
6.	DEWI SETYARINI, S.H.	Analisis Perkara Peradilan PN Biak	Panitera Pengganti PN Biak
7.	IVALDO FILLOL NAINGGOLAN, S.E., S.H.	Kasubag PTIP PN Merauke	Sekretaris PN Merauke
8.	PAHALA M. RIAN TO HUTAGALUNG, S.H.	Panitera Pengganti PN Merauke	Panmud Pidana PN Merauke
9.	AGUNG MARPAUNG, S.H.	Jurusita PN Merauke	Panitera Pengganti PN Merauke
10.	MARTHA TASIK, S.IP.	Panmud Hukum PN Nabire	Panmud Pidana PN Nabire
11.	ZAINAL, S.H.	Panmud Pidana PN Nabire	Panmud Perdata PN Nabire
12.	MAULANA MUSA SUGI ALAM, S.H.	Sekretaris PA Kabupaten Malang	Sekretaris PT Jayapura
13.	JOHANA CAROLINA LEKBILA, S.IP, S.H.	Panitera PN Atambua	Panitera PN Jayapura
14.	RONALD LAUTERBOOM, S.H., M.H.	Hakim PN Sukhoarjo	Hakim PN Jayapura
15.	LIDIA AWINERO, S.H., M.H.	Hakim PN Tegal	Hakim PN Jayapura
16.	SALEMAN LATUPONO, S.H.,M.H.	Panmud Pidana PN Labuha	Panmud Pidana PN Jayapura
17.	DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.	Panmud Pidana PN Manokwari	Panitera PN Serui
18.	HIRMAWAN A. WICAKSONO, S.H., M.H.	Hakim PN Pangkal Pinang	Wakil Ketua PN Wamena

19.	ARIF NUGRAHA, S.H.	CPNS PT Jayapura	PNS PT Jayapura
20	MARTHA CHRISTINA KABES, S.E.	CPNS PT Jayapura	PNS PT Jayapura
21	SABRI, A.Md.	CPNS PT Jayapura	PNS PT Jayapura
22	VERLA REMI JULIA, A.md.A.P.	CPNS PT Jayapura	PNS PT Jayapura
23	MISHARA M. HANAFAI, S.H.	CPNS PN Biak	PNS PN Biak
24	HAFSAH FAJAR JATI, S.E.	CPNS PN Jayapura	PNS PN Jayapura
25	DEVI KIMBERLY LIRUNGAN, S.H.	CPNS PN Jayapura	PNS PN Jayapura
26	HENRI MARTHEN OKOKA, S.H.	CPNS PN Jayapura	PNS PN Jayapura
27	MAHADAN. E . HAEZER SINAGA, S.H.	CPNS PN Merauke	PNS PN Merauke
28	MUH. NUR ALAMSYAH, A.Md.A.B.	CPNS PN Merauke	PNS PN Merauke
29	INDRASATYA, S.H.	CPNS PN Nabire	PNS PN Nabire
30	A. ARDIANSYAH DG. MATERRU, A.Md.	CPNS PN Nabire	PNS PN Nabire
31	CHARISMA BILL BRINTTON SIMATUPANG, S.H.	CPNS PN Serui	PNS PN Serui
32	LUKMAN, A.Md.	CPNS PN Serui	PNS PN Serui
33	RIZKY PRATAMA, S.H.	CPNS PN Timika	PNS PN Timika
34	PARANRENGI, A.Md.	CPNS PN Timika	PNS PN Timika
35	MUHAMMAD LUKMAN AZIS, S.H.	CPNS PN Wamena	PNS PN Wamena
36	IMANNUL YAKIN, S.H.	CPNS PN Wamena	PNS PN Wamena
37	SAYYID MUH. YUSUF, A.Md.	CPNS PN Wamena	PNS PN Wamena
38	MAHATIR JUN Aidil, A.Md.	CPNS PN Wamena	PNS PN Wamena

3. Pemberhentian dan Pensiun

Pada tahun 2023 tercatat ada 3 (tiga) pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang diberhentikan dan pensiun.

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	I GST KT SUARTA, S.Sos., M.H.	Kabag Umum dan Keuangan	Pensiun BUP

2	LEGEMAN	Pengadministrasi Perpustakaan	Pensiun BUP
3	NUR YUWONO A. NUGROHO, A.Md.	Pengelola Sistem dan Jaringan	Pemberhentian Dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri

Adapun daftar Hakim dan Pegawai yang diberhentikan dan pensiun pada tahun 2023 di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim/Pegawai yang pensiun
1	Pengadilan Tinggi Jayapura	3
2	Pengadilan Negeri Nabire	1
3	Pengadilan Negeri Wamena	1

Formasi Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

No	Nama Pengadilan	Ketua	Wakil	Hakim Karier	Hakim Adhoc	Panitera	Sekretaris	Kabag	Panmud	Kasub	PP	JS/JSP	Staf	Honor
1	PT JAYAPURA	1	0	5	3	1	1	2	4	3	6	0	19	14
2	PN JAYAPURA	1	1	11	5	1	1	0	3	3	13	9	10	10
3	PN BIAK	1	0	5	0	1	1	0	3	3	1	3	4	7
4	PN MERAUKE	1	0	4	3	1	1	0	3	2	1	1	5	6
5	PN NABIRE	1	0	5	0	1	1	0	2	3	2	3	4	7
6	PN SERUI	1	0	4	0	1	1	0	3	3	3	1	3	6
7	PN TIMIKA	1	0	3	0	1	1	0	3	2	1	2	6	6
8	PN WAMENA	1	1	5	0	1	1	0	3	3	2	3	7	6
JUMLAH		8	2	42	11	8	8	2	24	22	29	22	58	62

4. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah Mengikuti Diklat)

Dalam rangka pembinaan sumber daya manusia, baik tenaga teknis yudisial maupun non teknis yudisial, Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan setiap individu melalui partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, maupun Pengadilan Tinggi Jayapura. Adapun pendidikan dan pelatihan yang

pernah diikuti selama tahun 2023, yaitu sebagaimana terlampir dalam tabel berikut ini :

Tabel Daftar Kegiatan Pembinaan SDM Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2023

NO.	Kegiatan	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Pelatihan Hakim kelanjutan I (CJE I)	I Made Bayu Gautama Suadi Putra, S.H	Hakim	30 januari s.d 11 Februari 2023
		Sarmaida Eka R. L Tobing, S.H., M.H		
		Wara Laso M Sombolinggi, S.H., M.H.		
		Enni Riestiana, S.H		
		Junaedi Azis, S.H		
		Feisal Maulana, S.H		
2	Pelatihan Smart ASN <i>English Communication Skills For the Indonesia Civil Service (ECSCS)</i> Tahun 2023	Saifulloh Anwar , S.H., M.H	Hakim	20 s.d 24 Februari 2023
3	Pelatihan <i>Sertifikasi</i> perikanan bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Dinar Pakpahan	Hakim	27 Februari s.d 18 Maret 2023
4	Pelatihan <i>Teknis Yudisial Gugatan Sederhana</i> bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Muhammad Irsyad Hasyim, S.H.	Hakim	20 Maret s.d 1 April 2023
		Christian Isal Sanggalangi, S.H		
		Wahyu Iswantoro, S.H		
		Yanuar Nurul Fahmi, S.H		
		Rofik Budiantoro, S.H		
		Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H		
6	Diklat <i>terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III Kerjasama Badan Diklat Kejasaaan RI</i>	Muhammad Syawaludin, S.H.	Hakim	28 Maret s.d 13 April 2023
8	Pelatihan <i>Teknis Yudisial Penistaan Agama</i> bagi Hakim Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Seluruh Indonesia	Rudy Setyawan, S.H	Hakim	27 Februari s.d 11 Maret 2023
9	Pelatihan <i>Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) bagi Hakim Karier dan hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama</i>	Korneles Waroi, S.H	Hakim	10 April s.d 16 Mei 2023
		Dinar Pakpahan		
		Muhammad Syawaludin, S.H.		
		Rudy Setyawan, S.H		

		Paulus Raiwaki, S.E Yance Pakaila, ST, M.M		
10	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) bagi Hakim Karier dan hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama	Dedy Heriyanto, S.H	Hakim	10 April s.d 16 Mei 2023
11	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingjat Pertama Peradilan Umum	Putu Mahendra, S.H., M.H	Hakim	05 s.d 31 Mei 2023
12	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingjat Pertama Peradilan Umum	Willem Depondoye, S.H	Hakim	05 s.d 31 Mei 2023
13	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SIPP) Wilayah Makassar Angkatan I-V Tahun 2023	Herna Dian Prihatiny Napan, S.T	Kasub Rencana Program dan Anggaran	12 s.d 16 Juni 2023
14	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan III s.d V dari tempat tugas tahun 2023	Adolfiana Susan Wotos, S.I.P	Analisis Tata Laksana	11 Agustus s.d 7 September 2023
15	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang III	Grancely Novendra Manuhutu, S.H	Hakim	24 Juli s.d 12 Agustus 2023
16	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Umum	Erni Stin Ibo, S.H	Panitera Pengganti	26 Juli s.d 5 Agustus 2023
		Irwan, S.H., M.H	Panmud Hukum	
		Veni Sara, S.H	Tata Laksana	
17	Pelatihan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Integratif (SIPP) Wilayah Makassar Angkatan I-V Tahun 2023	Lila Fitriza, S.H	Analisis Pelaporan Keuangan	3 s.d 7 Juli 2023
		Bagus Wahyu Kurniawan, S.E	Pengelola BMN	
		Sabri, A.Md		
18	Pelatihan Kompetensi PBJP Level I Model MOOC di Wilayah Papua	Yusuf Ryan Fajar	Pengadministrasi Penerimaan	24 Mei s.d 24 Juli 2023
19	Pelatihan Kompetensi PBJP Level I Model MOOC batch V	Yusuf Ryan Fajar	Pengadministrasi Penerimaan	20 September s.d 03 Oktober 2023
20	Pelatihan Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Gelombang I	Deddy Thusmanhadi, S.H.	Hakim	5 s.d 24 Juni 2023
21	Mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan Bagi Panitera Pengadilan Negeri K IA	Suyatmi, S.H., M.H	Panmud Tipikor	2 s.d Oktober 2023
22	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) bagi Hakim Karier dan hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama	Korneles Waroi, S.H	Hakim	10 April s.d 16 Mei 2023
		Paulus Raiwaki, S.E		
		Yance Pakaila, ST, M.M		
23	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Umum	Erni Stin Ibo, S.H	Panitera Pengganti	26 Juli s.d 5 Agustus 2023
24	Pembinaan oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI.	Dedy Heriyanto, S.H.	Ketua PN Wamena	11 Desember 2023.
25	Pelatihan Hakim Berke lanjutan 1/ Continuing Justice Education (CJE1)	Junaedi Azis, S.H.	Hakim PN Wamena	3 Juni 2023.
26	Pelatihan Smart ASN- ECSCS	Saifullah Anwar, S.H., M.H.	Hakim PN Wamena	6 s.d 10 Februari 2023.
27	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat	Agustino	Sekretaris PN	27 November s.d. 1

	Pembuat Komitmen Angkatan VII Tahun 2023.	Edward Rizal S.E.,S.H.	Wamena	Desember 2023.
28	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan IV Tahun 2023.	Rizal Setiawan Rumalean, S.H.	Kasub Bagian Umum dan Keuangan PN Wamena	24 s.d. 28 Juli 2023.
29	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar Angkatan VI Tahun 2023.	Rizal Setiawan Rumalean, S.H.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Wamena	24 s.d 28 Juli 2023.
30	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan VII Tahun 2023.	Dedy M. Arham,S.A.B.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan PN Wamena	27 November s.d 1 Desember 2023.
31	Pelatihan Jarak Jauh Pejabat Pembuat Komitmen Angkatan V Tahun 2023.	Ruben Permana Putra,S.Akun.	Bendahara/Staf Sub Bagian Umum dan Keuangan PN Wamena	11 s.d 15 September 2023.
32	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN Kerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Sulawesi Selatan	IVALDO FILLOL NAINGGOLAN, S.E., S.H.	Sekretaris	3 s.d. 7 April 2023
33	Rapat Evaluasi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010- 2035 oleh Ketua Kamar Pembinaan/ coordinator tim pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	15 s.d. 17 Mei 2023
		IVALDO FILLOL NAINGGOLAN, S.E., S.H.	Sekretaris	
		MATIUS PALEON, S.H.	Panitera	
34	Bimbingan Teknis ASN Tahun Anggaran 2023	IVALDO FILLOL NAINGGOLAN, S.E., S.H.	SEKRETARIS	7 s.d. 11 November 2023
		NAYA MERIANI, S.H.	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	
35	Pelatihan Singkat Hak Kekayaan Intelektual di Wilayah Hukum PT Jayapura	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	10 s.d. 13 April 2023
		GANANG HARIYUDO PRAKOSO, S.H.	Hakim Pratama Muda	
		INDRASWARA NUGRAHA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	
36	Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bagi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc PHI Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	10 s.d. 18 April 2023 dan 1 s.d. 16 Mei 2023
37	Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	31 Agustus 2023 s.d. 3 September 2023
		INDRASWARA NUGRAHA, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda	
38	Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Peradilan bagi Pimpinan Pengadilan Tahun Anggaran 2023	DINAR PAKPAHAN, S.H., M.H.	Ketua	13 s.d. 27 November 2023

39	Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan III	GANANG HARIYUDO PRAKOSO, S.H.	Hakim Pratama Muda	Tahap I (Pembelajaran Mandiri E-learning) : 18 s.d. 22 September 2023 Tahap II (Pembelajaran Klasikal) : 24 s.d. 27 September 2023
40	Asistensi Aplikasi SAKTI dan Digital Payment	REKY PRATAMA, A.Md.	Pengelola Perkara / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	24 Mei 2023
41	Bimbingan Teknis (BIMTEK) terkait Pengisian Formulir Pendataan Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Tahun 2023	REKY PRATAMA, A.Md.	Pengelola Perkara / Pelaksana Sub Bagian Umum dan Keuangan	15 s.d. 17 Mei 2023
42	Konsultasi Teknis Program Kelautan dan Perikanan di Perairan Kabupaten Merauke	UNGGUL SENOAJI, S.H.	Hakim Ad Hoc Khusus Perikanan	15 s.d. 16 Februari 2023
43	Sosialisasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik dan Evaluasi Penggunaan Digipay pada Wilayah Kerja KPPN Merauke	MUH. NUR ALAMSYAH, A.Md.A.B	Pengelola Perkara / Pelaksana Sub Bagian PTIP	19 Januari 2023
		FAISAL RAHMAT	PPNPN / Pelaksana Sub Bagian Umum Keuangan	
44	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum seluruh Indonesia	MUHAMMAD IRSYAD HASYIM, S.H.	Hakim Pratama Muda	20 s.d. 24 Maret 2023 Dan 26 Maret s.d. 1 April 2023
45	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) Peradilan Umum seluruh Indonesia	I MADE BAYU GAUTAMA SUADI PUTRA, S.H.	Hakim Pratama Muda	5 FEBRUARI s.d. 10 FEBRUARI 2023
46	Diklat Hakim Berkelanjutan (CJE I) Peradilan Umum Seluruh Indonesia	ENNI RIESTIANA, S.H.	Hakim	30 Januari s.d 11 Februari 2023
47	Diklat English Tor Social And Office Communication Th. 2023	CHANDRA RYAN ISKANDAR, S.M.	Jurusita Pengganti	13 s.d 17 Maret 2023
48	Undangan Uji Publik dan Knowledge Sharing Buku Saku SIPP-EIS bagi Pimpinan Pengadilan Tahun 2023	R. KEMALA NABABAN, S.H.	Hakim	6 s.d 9 Maret 2023
49	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Se-Indonesia	CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI, S.H	Hakim	20 Maret s.d 1 April 2023
50	Diklat Terpadu Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Angkatan III Kerjasama Badan Diklat Kejaksaan RI	MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.	Ketua PN. Biak	28 Maret s.d 13 April 2023
51	Pembinaan Administrasi Peradilan Umum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura	MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.	Ketua PN. Biak	31 Agustus 2 September 2023
52	Pelatihan Teknis Yudisial Jusurita dan Jusurita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia	CHANDRA RYAN ISKANDAR, S.M.	Jurusita Pengganti	25 September s.d 7 Oktober 2023
53	Pelatihan Bersama Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara	1. CHRISTIAN ISAL SANGGALANGI,	1. Hakim	24 s.d 27 September 2023

	Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Angkatan III Bagi Hakim dan Panitera Peradilan Umum di Makassar	S.H. 2. DIANA E. CHRISTINA, S.H.	2. Panmud Pidana	
54	Bimbingan Teknis ASN Tahun Anggaran 2023 di Jayapura	1. HENY SUSILAWATY, S.T. 2. ZAENAL EMBA, A.Md 3. FEBRI YUNANDA, A.Md	1. Sekretaris 2. Kasubbag Umum & Keuangan 3. Pengelola Perkara	8 s.d 10 November 2023
55	Kegiatan Seleksi Uji Kepatutan dan Kelayakan Bagi Calon Pimpinan PN. Klas IB Gel.II T.A 2023 di Surabaya - Jawa Timur	MUHAMMAD SYAWALUDIN, S.H.	Ketua PN. Biak	27 s.d 28 November 2023
56	Kemimpinan dan Manajemen administrasi perkara bagi panitera	Semuel E.D Resimaran, SH.MH	(Panitera)	13 s.d. 27 November 2023
57	Bimtek ASN Tahun Anggaran 2023	Muh Arifin, S.HI Maxi Ronaldo Menanti, S.AP	(Sekretaris) (Kasubbag Umum dan Keuangan)	7 s/d 11 November 2023
58	Pelatihan teknis yudisial panitera/panitera pengganti peradilan umum seluruh indonesia	Irwan, S.H., M.H.	(Panitera Pengganti)	31 juli s.d. 5 Agustus 2023
59	Short Course on intelektual property Rights (pelatihan singkat hak kekayaan intelektual)	I Gede Parama Iswara, S.H.	(Hakim)	10 s.d 13 April 2023
60	Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industri (PHI) bagi Hakim Karir dan Hakim ad hoc	Rudy Setyawan, S.H	(Ketua)	1 s.d. 16 Mei 2023
61	Pelatihan Teknis Yudisial Gugatan Sederhana	Yanuar Nurul Fahmi, S.H	(Hakim)	26 Maret s.d. 1 April 2023
62	Publik dan Knowledge sehangar buku saku SIPP-EIS bagi Pimpinan Pengadilan Tahun 2023	I Gede Parama Iswara, S.H.	(Hakim)	6 s.d 9 Maret 2023
63	Pelatihan Teknis yudisial penistaan agama bagi hakim peradilan umum dan militer	Rudy Setyawan, S.H	(Ketua)	5 s.d. 11 Maret 2023
64	Pelatihan Manajemen Pengelolaan BMN	Surianto	Sekretaris	3 s.d 7 April 2023
65	Pelatihan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Terpadu Gelombang I	DeddyThusmanhadi, S.H.	KPN Serui	5 s.d 24 Juni 2023
66	Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Administrasi Perkara Peradilan Bagi Panitera Pengadilan	Daily TigorNainggolan, S.H.	Panitera	13 s.d 27 November 2023
67	Bimtek ASN	Surianto, S.E.,S.H.	Sekretaris	8 s.d 10 November 2023
68	Bimtek ASN	Sri Hajera,S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan	8 s.d 10 November 2023
69	Bimtek ASN	Lukman, A.Md	Pengelola Perkara	8 s.d 10 November 2023
70	Pelatihan Hakim kelanjutan I (CJE I)	Sarmaida Eka R. L Tobing, S.H., M.H Wara Laso M	Hakim	30 Januari s.d 11 Februari 2023

		Sombolinggi, S.H., M.H.		
71	Pelatihan <i>Teknis Yudisial Gugatan Sederhana</i> bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia	Muh Khusnul Fauzi Zainal, S.H., M.H	Hakim	20 Maret s.d 1 April 2023
72	Pelatihan Singkat Kekayaan Intelektual	Yajid, S.H., M.H. Sarmaida Eka R. L Tobing, S.H., M.H Wara Laso M Sombolinggi, S.H., M.H.	Hakim	10 April s.d 13 April 2023
73	Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum	Wara Laso M Sombolinggi, S.H., M.H.	Hakim	05 s.d 31 Mei 2023
74	Pelatihan Online Manajemen ASN Angkatan III s.d V dari tempat tahun 2023	Adolfiana Susan Wotos, S.I.P	Analisis Tata Laksana	11 Agustus s.d 7 September 2023
75	Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/ Panitera Pengganti Peradilan Umum	Veni Sara, S.H	Panmud Hukum	26 Juli s.d 5 Agustus 2023
76	Pelatihan Bersama APH dalam penanganan Perkara Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Angkatan III	Sarmaida Eka R. L Tobing, S.H., M.H	Hakim	18 September s.d. 27 September 2023
77	Pelatihan Teknis Fungsional Jurusita/ Jurusita Pengganti Peradilan Umum Tahun 2023	Julius Adi Putra Saragih, S.H.	Jurusita	25 September s.d 06 Oktober 2023

Jumlah SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat tahun 2023 di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

No	Nama Pengadilan	Jumlah Hakim yang Mengikuti Diklat	Jumlah Pegawai Teknis yang Mengikuti Diklat	Jumlah Prgawai Non Teknis yang Mengikuti Diklat
1	PT JAYAPURA	0	2	5
2	PN JAYAPURA	7	2	0
3	PN WAMENA	7	0	5
4	PN MERAUKE	16	1	8
5	PN BIAK	10	3	3
6	PN NABIRE	5	2	2
7	PN SERUI	3	1	4
8	PN TIMIKA	11	2	3

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA,
DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada tahun 2023 Pengadilan Tinggi Jayapura mendapatkan alokasi anggaran pada 2 (dua) DIPA yaitu DIPA (01) dari eselon 1 Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) dari eselon 1 Badan Peradilan Umum. Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung tercapainya tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Jayapura. Pada Rincian Kertas Kerja (RKK) Pengadilan Tinggi Jayapura, baik DIPA 400022 dan DIPA 400023 terdapat realisasi anggaran selama tahun anggaran 2023. Berikut daftar realisasi anggaran tersebut :

Tabel. DIPA 400022

Realisasi pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp. 15,679,494,000	Rp. 14,642,764,664	Rp. 1,036,729,336

- ❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 13,453,640,000	Rp. 12,857,681,699	Rp. 595,958,301
PN WAMENA	Rp. 9,006,017,000	Rp. 8,704,346,455	Rp. 301,670,545
PN MERAUKE	Rp. 4,884,627,000	Rp. 4,801,996,553	Rp. 82,630,447
PN BIAK	Rp. 4,503,261,000	Rp. 4,283,303,639	Rp. 219,957,361
PN NABIRE	Rp. 5,342,285,000	Rp. 4,408,717,173	Rp. 933,567,827
PN SERUI	Rp. 4,457,604,000	Rp. 4,434,420,000	Rp. 23,184,000
PN TIMIKA	Rp. 5,020,002,000	Rp. 4,870,176,935	Rp. 149,825,065

2. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 105,230,000	Rp. 104,650,000	Rp. 580,000

❖ Rekapitulasi Realisasi DIPA 01 Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 126,000,000	Rp. 124,774,000	Rp. 1,226,000
PN WAMENA	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
PN MERAUKE	Rp. 200,000,000	Rp. 200,000,000	Rp. 0
PN BIAK	Rp. 200,000,000	Rp. 200,000,000	Rp. 0
PN NABIRE	Rp. 29,375,000	Rp. 29,372,386	Rp. 2,614
PN SERUI	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0
PN TIMIKA	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0

Tabel. DIPA 400023

1. Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp. 288,400,000	Rp. 243,192,460	Rp. 45,207,540

2. Rekapitulasi Realisasi DIPA 03 Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Satker	Pagu	Realisasi	Sisa Dana
PN JAYAPURA	Rp. 240,775,000	Rp. 221,168,930	Rp. 19,606,070
PN WAMENA	Rp. 43,500,000	Rp. 40,877,000	Rp. 2,623,000
PN MERAUKE	Rp. 246,300,000	Rp. 246,080,872	Rp. 219,128
PN BIAK	Rp. 88,200,000	Rp. 81,569,000	Rp. 6,631,000
PN NABIRE	Rp. 49,500,000	Rp. 45,923,000	Rp. 3,577,000
PN SERUI	Rp. 91,200,000	Rp. 88,297,806	Rp. 2,902,194
PN TIMIKA	Rp. 107,500,000	Rp. 106,003,000	Rp. 1,497,000

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung dan Bangunan

Gedung Kantor

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Jayapura terletak di Jl. Tanjung Ria No. 98 Base "G" berdiri diatas tanah seluas 7,856m² dan Luas gedung bangunan kantor Pengadilan Tinggi Jayapura sebelumnya 2,498m², pada tahun anggaran 2014 sampai 2016 telah dilakukan rehabilitasi bangunan prototype yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung. Bahwa sampai dengan saat ini pembangunannya telah mencapai 100% (seratus persen).

Rumah Dinas

Pengadilan Tinggi Jayapura memiliki rumah dinas sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dengan rincian sebagai berikut:

- 12 unit rumah dinas type C, yang terletak di Jl. Tanjung Ria No.98
- 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Angkasa Indah Angkasa Pura
- 8 unit rumah dinas type B, yang terletak di Jl. Pasifik Indah III Pasir Dua
- 2 unit rumah dinas type B, yang terletak di Pematongan Hewan Entrop

Rekapitulasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura

Satker	Luas Gedung	Kondisi	Keterangan
PN JAYAPURA	800 m2	Baik	-
PN WAMENA	4.680 m2	Baik	-
PN MERAUKE	1.071 m2	Baik	-
PN BIAK	1.130 m2	Baik	-
PN NABIRE	1.376 m2	Baik	-
PN SERUI	4.030 m2	Baik	-
PN TIMIKA	2.237 m2	Baik	-

Rekapitulasi Rumah Dinas Pengadilan Negeri se- Wilayah PT Jayapura

Satker	Kondisi			Jumlah
	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	
PN JAYAPURA	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit
PN WAMENA	7 Unit	0 Unit	0 Unit	7 Unit
PN MERAUKE	14 Unit	0 Unit	0 Unit	14 Unit

PN BIAK	10 Unit	0 Unit	0 Unit	10 Unit
PN NABIRE	13 Unit	0 Unit	0 Unit	13 Unit
PN SERUI	7 Unit	2 Unit	0 Unit	9 Unit
PN TIMIKA	3 Unit	7 Unit	0 Unit	10 Unit

a) Pengadaan

Dalam tahun 2023 terdapat pengadaan sarana dan prasarana lingkungan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada tahun 2023.

Rekapitulasi Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	Printer	1 Unit	Rp 4.949.500
	Smart TV	1 Unit	Rp 13.986.000
PN WAMENA	-	-	-
PN MERAUKE	-	-	-
PN BIAK			
PN NABIRE			
PN SERUI	Printer	2 Unit	Rp 1.800.000
PN TIMIKA	-	-	-

2. Pengadilan Tinggi Jayapura tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk Pengadaan Layanan Prasarana Internal Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan pada tahun anggaran 2023.

Rekapitulasi Pengadaan Layanan Prasarana Internal Pembangunan /renovasi gedung dan bangunan Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	-	-	-
PN WAMENA	-	-	-

PN MERAUKE	-	-	-
PN BIAK	-	-	-
PN NABIRE	Pengadaan Layanan Sarana dan Prasarana Disabilitas	1 Set	Rp 27.872.386
PN SERUI	-	-	-
PN TIMIKA	-	-	-

3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran berupa Meubelair dengan nilai kontrak Rp. 113.240.000,- (seratus tiga belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang pengadaannya telah tercapai 100 %.

**Rekapitulasi Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura**

Satker	JENIS	VOLUME	JUMLAH
PN JAYAPURA	Mic Wireless	1 Buah	Rp 11.988.000
	Kursi Panjang untuk Ruang Tunggu	10 Buah	Rp 19.758.000
	Sofa Ruangan Ketua dan Wakil Ketua	3 Set	Rp 74.092.500
	Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	6 Unit	Rp 4.800.000
PN WAMENA	Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	4 Set	Rp 9.184.000
PN MERAUKE	Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	1 Set	Rp 3.999.996
	Meubelair	1 Paket	Rp 200.000.000
PN BIAK	Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	1 Set	Rp 3.780.000
	Meubelair	1 Paket	Rp 200.000.000
PN NABIRE	Meja Kerja Kayu	2 Unit	Rp 3.200.000
	Kursi Kayu	2 Unit	Rp 1.100.000
	Walker Polding	2 Unit	Rp 1.400.000
	Hearing Aid	1 Unit	Rp 1.500.000
PN SERUI	Kursi Besi Metal	2 Unit	Rp 992.000
	Meja Kerja Kayu	2 Unit	Rp 1.800.000
PN TIMIKA	Inventaris CPNS (Meja dan Kursi)	4 Unit	Rp 4.592.000

b) Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

**Rekapitulasi Biaya Pemeliharaan Gedung dan bangunan
Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura**

Satker	Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Keterangan
PN JAYAPURA	Rp 870,704,960	-
PN WAMENA	Rp 932.360.000	-
PN MERAUKE	Rp 404,430,200	-
PN BIAK	Rp 387,911,000	-
PN NABIRE	Rp 383.722.577	-
PN SERUI	Rp 801,868,180	-
PN TIMIKA	Rp 797.034.936	-

c) Penghapusan

Dalam tahun 2023, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Gedung dan Bangunan yang dikelola/digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

**Rekapitulasi Penghapusan aset berupa Gedung dan bangunan
Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura**

Satker	Aset Berupa	Nilai Aset
PN JAYAPURA	-	-
PN WAMENA	-	-
PN MERAUKE	-	-
PN BIAK	-	-
PN NABIRE	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	Rp 928.761.200
PN SERUI	-	-
PN TIMIKA	-	-

**Keadaan Aset Tanah Bangunan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan
Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun
2023**

❖ **Tanah**

Keadaan tanah Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	3.869	4.434.715.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II Type C	1.999	2.262.757.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.856	13.531.758.000
Jumlah			20.229.230.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Jayapura per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	4.252	6.671.801.000
2	Tanah Bangunan Bangunan Kantor Pemerintah	509	702.801.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	608	798.000.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	1.021	1.352.622.000
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	303	376.398.000
6	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	89.750.000
7	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	494.760.000
8	Tanah Bangunan Balai Sidang /Pertemuan	1.000	53.438.000
Jumlah			10.539.570.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Wamena per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.950	Rp. 4.422.601.000
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	2.046	Rp. 4.640.329.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	450	Rp. 1.080.675.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	780	Rp. 1.784.250.000.
5	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	1.609	Rp. 3.272.707.000
6	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol. I	5.800	Rp. 11.866.802.000
Jumlah			Rp. 27.066.907.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Merauke per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	3.197	3.856.470.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	24.540	37.914.300.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang/Pertemuan	5.403	116.347.000
4	Tanah Padang Alang-Alang	1.200	1.140.000.000
Jumlah			43.027.117.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Biak per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	3.324	1.148.410.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8.324	7.666.992.000
Jumlah			8.815.402.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Nabire per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12.562	28.296.576.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	1.433	635.528.000
3	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.010	2.216.571.000
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.000	845.882.000
Jumlah			31.994.557.000

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Serui per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Type C	2.600	1.483.611.156
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.030	2.069.223.000
3	Tanah Bangunan Balai Sidang / Pertemuan	1.952	160.868.000
Jumlah			3.713.702.156

Keadaan tanah Pengadilan Negeri Kota Timika per 31 Desember 2023 sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan III	5.000	5.735.000.000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.160	14.407.186.000
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	3.000	1.213.500.000
Jumlah			21.355.686.000

❖ Gedung dan Bangunan

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4	12.978.715.000
2	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	1	5.850.171.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	0	-
4	Rumah Negara Golongan II Type B	2	1.144.191.000
5	Rumah Dinas Golongan II Type C	18	4.184.910.000
6	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kepemilikan	2	761.017.000
7	Pagar Permanen	2	1.046.631.000
8	Pagar Lainnya	1	69.350.000
Jumlah			26.034.985.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Jayapura Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	862.600.000
2	Bangunan Tempat Sidang /Zitting Plats	3	219.860.000
3	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	3	862.610.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe E Permanen	8	1.341.523.400
Jumlah			3.286.593.400

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Wamena Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Gedung Bangunan Kantor Permanen	1	11.282.744.964
2	Rumah Negara Gol. I Tipe C Permanen	7	2.457.574.689
3	Rumah Negara Gol. I Tipe D Permanen	1	864.604.256
4	Pagar Permanen	1	148.861.500
5	Pagar Permanen	1	75.221.500
Jumlah			14. 829.006.909

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Merauke Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	7.366.234.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	1	167.600.000
3	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	2	305.179.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	13	3.450.929.000
5	Rumah Negara Golongan II Lainnya	1	209.566.000
6	Pagar Permanen	1	520.357.000
Jumlah			12.019.865.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Biak Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	13.320.848.936
2	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.039.001.000
3	Rumah Negara Golongan II	10	2.975.124.796
4	Pagar Permanen	1	527.526.000
Jumlah			17.862.500.732

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Nabire Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas Nilai (unit) (Rp)	No
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	5.000.932.000
2	Bangunan Gedung Instalasi Lainnya	2	284.602.000
3	Bangunan Gedung Perpustakaan Semi Permanen	1	85.969.000
4	Bangunan Tempat Sidang/Zitting Plaat	1	1.354.444.000
5	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	947.974.000
6	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	8	1.158.572.000
7	Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen	5	490.635.000
Jumlah			9.323.128.000

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Serui Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	11.103.143.000
2	Gedung Pos Jaga Permanen	2	132.972.000
3	Rumah Negara Golongan I Type C	7	1.457.325.000
4	Rumah Negara Golongan II Type D	2	237.136.000
5	Pagar Permanen	2	1.223.534.000
6	Taman	1	1.234.426.000
7	Bangunan Tempat Parkir	2	260.032.000

Jumlah	15.648.568.000
---------------	----------------

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Negeri Kota Timika Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3	21.809.339.000
2	Bangunan Parkir Terbuka Permanen	1	207.527.000
3	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1.086.295.000
4	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	1.893.610.000
Jumlah			24.996.771.000

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a) Pengadaan persediaan Kantor

Dalam tahun 2023 terdapat pengadaan sarana dan persediaan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Dalam Tahun 2023 telah diadakan pembelian barang-barang persediaan dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk DIPA 01, senilai Rp. 90.420.500,-
- Untuk DIPA 03, senilai Rp. 17.531.500,-

b) Pemeliharaan Kendaraan dan Inventaris kantor

Dalam Tahun 2023 telah dilakukan pemeliharaan atas sarana dan prasarana fasilitas gedung yang bersumber dari belanja barang dengan perincian sebagai berikut:

1. Pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas roda 4 sebanyak 9 (sembilan) unit senilai: Rp. 183,131,263,- (seratus delapan puluh tiga juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)
2. Pemeliharaan dan operasional kendaraan roda 2 sebanyak 13 (tiga belas) unit senilai: Rp. 13.442.148,- (tiga belas juta empat ratus empat puluh dua ribu seratus empat puluh delapan rupiah)
3. Pemeliharaan inventaris kantor lainnya senilai: Rp. 157.703.014,- (seratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tiga ribu empat belas rupiah).

Biaya Pemeliharaan Kendaraan dan Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Pemeliharaan Kendaraan (Rp)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (Rp)
PN JAYAPURA	162.589.286	70.943.031
PN WAMENA	83.616.000	28.720.000
PN MERAUKE	121.211.380	55.538.000
PN BIAK	73.704.000	115.550.000
PN NABIRE	97.583.874	43.291.000
PN SERUI	129.320.037	30.661.360
PN TIMIKA	152.699.720	43.019.000

Rekapitulasi Aset Kendaraan Roda Dua (2) maupun Roda Empat (4) yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura

Satker	Jumlah Kendaraan Roda Empat	Jumlah Kendaraan Roda Dua
PN JAYAPURA	4 Unit	7 Unit
PN WAMENA	2 Unit	9 Unit
PN MERAUKE	3 Unit	5 Unit
PN BIAK	2 Unit	10 Unit
PN NABIRE	5 Unit	2 Unit
PN SERUI	4 Unit	11 Unit
PN TIMIKA	5 Unit	9 Unit

c) Penghapusan

Dalam tahun 2023, tidak terdapat Penghapusan terhadap aset berupa Peralatan dan Mesin yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura.

Rekapitulasi Penghapusan aset berupa peralatan dan mesin Pengadilan Negeri Se Wilayah PT Jayapura

Satker	Aset Berupa	Nilai Aset (Rp)
PN JAYAPURA	-	-
PN WAMENA	-	-
PN MERAUKE	-	-
PN BIAK	Peralatan dan Mesin	523.948.788

PN NABIRE	-	-
PN SERUI	-	-
PN TIMIKA	-	-

Selengkapnya mengenai keadaan sarana dan prasarana fasilitas gedung Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2023 beserta mutasi selama tahun 2023 dapat kami uraikan sebagai berikut :

Keadaan Aset Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2023

Keadaan Peralatan dan Mesin Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Kode	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	
		Kuantitas	Nilai (Rp)
3.01.03.04.002	Portable Generating Set	1	436.725.000
3.01.03.04.003	Stationary Generating Set	1	698.500.000
3.01.03.05.999	Pompa Lainnya	1	9.400.000
3.02.01.01.001	Sedan	2	445.991.420
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang	4	526.850.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	6	97.301.000
3.03.02.12.016	Mesin Battery Set / Pengisi Accu	2	1.200.000
3.04.01.04.004	Lemari Penyimpan	2	2.400.000
3.05.01.01.002	Mesin Ketik Manual Standard (14-16	20	38.908.620
3.05.01.04.002	Lemari Kayu	1	3.700.400
3.05.01.04.004	Rak Kayu	34	149.510.000
3.05.01.04.005	Filing Cabinet Besi	4	12.650.000
3.05.01.04.006	Filing Cabinet Kayu	3	13.500.000
3.05.01.04.007	Brandkas	2	7.080.000
3.05.01.05.001	Tabung Pemadam Api	2	23.800.000
3.05.01.05.008	Papan Visual/Papan Nama	9	10.330.000
3.05.01.05.017	Mesin Absensi	3	9.000.000
3.05.01.05.048	LCD Projector/Infocus	1	2.750.000

3.05.01.99.999	Alat Kantor Lainnya	4	32.400.000
3.05.02.01.002	Meja Kerja Kayu	21	15.520.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	89	467.267.033
3.05.02.01.005	Sice	228	367.848.952
3.05.02.01.008	Meja Rapat	10	120.891.724
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	9	45.491.631
3.05.02.01.022	Partisi	1	12.440.889
3.05.02.01.029	Backdrop TV/Wardrobe	2	23.500.000
3.05.02.01.033	Sofa	8	44.000.000
3.05.02.03.001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum	54	103.400.000
3.05.02.03.003	Mesin Pemotong Rumput	2	9.800.000
3.05.02.04.001	Lemari Es	1	5.000.000
3.05.02.04.003	A.C. Window	6	193.220.000
3.05.02.04.004	A.C. Split	23	182.943.448
3.05.02.04.005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	4	120.000.000
3.05.02.06.002	Televisi	14	105.445.362
3.05.02.06.004	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	20.000.000
3.05.02.06.007	Loudspeaker	3	17.098.000
3.05.02.06.008	Sound System	4	116.320.800
3.05.02.06.012	Wireless	3	26.148.900
3.05.02.06.015	Microphone Table Stand	6	4.042.800
3.05.02.06.019	Stabilisator	1	250.000
3.05.02.06.026	Lambang Garuda Pancasila	5	1.008.000
3.05.02.06.030	Tiang Bendera	4	1.730.500
3.05.02.06.034	Tangga Aluminium	1	2.250.000
3.05.02.06.035	Kaca Hias	2	88.000
3.05.02.06.036	Dispenser	3	5.058.000
3.05.02.06.037	Mimbar/Podium	2	5.440.862
3.05.02.06.040	Palu Sidang	1	73.000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	2	6.125.828
3.05.02.06.046	Handy Cam	1	7.410.150
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	2	198.978.875
3.05.02.06.060	Asbak Tinggi	4	3.681.724

3.05.02.06.068	DVD Player	1	2.000.000
3.05.02.06.071	Kabel	10	13.000.000
3.06.01.01.036	Microphone/Wireless MIC	4	6.000.000
3.06.01.01.048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	19	100.164.450
3.06.01.02.045	Tripod Camera	1	550.000
3.06.01.02.061	Lensa Kamera	1	3.200.000
3.06.01.02.128	Camera Digital	2	19.809.000
3.06.01.02.132	Video Conference	1	18.059.640
3.06.01.02.135	LCD Monitor	1	4.449.200
3.06.02.01.003	Pesawat Telephone	10	3.300.000
3.06.02.06.002	Wireless Amplifier	1	10.000.000
3.06.02.07.005	Finger Printer Time and Attandance	1	12.616.000
3.06.02.09.005	Network Monitoring System	1	3.026.100
3.07.02.04.999	Alat Kesehatan Olah Raga Lainnya	3	29.783.000
3.08.01.12.025	Stabilizer	1	5.000.000
3.08.01.41.194	Personal Computer	7	94.500.000
3.10.01.01.004	Internet	1	86.480.000
3.10.01.01.999	Komputer Jaringan Lainnya	1	61.750.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	26	334.782.034
3.10.01.02.002	Lap Top	29	420.780.018
3.10.01.02.003	Note Book	3	31.370.000
3.10.02.01.013	Keyboard (Peralatan Mainframe)	1	25.000.000
3.10.02.03.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30	87.024.875
3.10.02.03.004	Scanner (Peralatan Personal	6	48.250.000
3.10.02.03.017	External/ Portable Hardisk	4	17.000.800
3.10.02.03.999	Peralatan Personal Komputer Lainnya	1	2.350.000
3.10.02.04.001	Server	4	244.057.000
3.10.02.04.002	Router	5	19.086.000
3.10.02.04.003	Hub	1	1.122.000
3.10.02.04.014	Rak Server	1	37.750.000
3.10.02.04.023	Wireless Access Point	1	3.800.000
3.10.02.04.033	Ethernet Converter	4	10.800.000
3.10.02.99.999	Peralatan Komputer Lainnya	2	350.000

3.15.04.04.004	Closed Circuit Television (CCTV)	11	51.332.000
3.02.01.01.001	Sedan	1	33.000.000
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2	19.000.000
3.02.01.04.001	Sepeda Motor	7	87.634.000
3.05.02.01.003	Kursi Besi/Metal	165	132.272.800
3.05.02.01.014	Meja Resepsionis	1	5.000.000
3.05.02.06.042	Lambang Instansi	3	132.000
3.05.02.06.058	Gordyin/Kray	1	114.429.700
3.07.01.08.128	Proyektor Romad Complet	1	40.000.000
3.08.01.41.101	Generator	1	17.000.000
3.10.01.02.001	P.C Unit	2	28.887.250

Selama tahun 2023, terjadi mutasi tambah peralatan dan mesin dengan perincian sebagai berikut:

Jenis Transaksi	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
<i>Saldo Awal (1 Januari 2023)</i>	14.738	53.414.525.598
<i>Perubahan (1 Januari – 31 Desember 2022)</i>		
<i>Pembelian</i>	20	113.240.000
Transfer Masuk	2	104.550.000
Reklasifikasi Masuk	0	0
Koreksi Pencatatan	0	0
Reklasifikasi Keluar	0	0
Penghentian BMN dari penggunaan	0	0
<i>Saldo Akhir per 31 Desember 2022</i>	14.759	53.632.315.598

Keterangan:

- 2 (dua) unit Lemari Kayu Rp 4.800.000,-
- 4 (empat) unit Meja Kerja Kayu Rp 3.960.000,-
- 4 (empat) unit Kursi Besi/Metal Rp. 3.780.000,-
- 2 (dua) unit Kasur/Spring Bed Rp 23.500.000,-
- 2 (dua) unit Sofa Rp 9.800.000,-
- 2 (dua) unit A.C. Split Rp 11.900.000,-
- 1 (satu) unit Sound System Rp 16.900.000,-
- 1 (satu) unit Tripod Camera Rp 550.000,-
- 1 (satu) unit Scanner dari Mahkamah Agung Rp 19.850.000,-
- 1 (satu) unit Server dari Mahkamah Agung Rp 84.700.000,-

- 1 (satu) unit Rak Server Rp 37.750.000
- 1 (satu) unit Peralatan Komputer Lainnya (Wifi Extender) Rp 300.000,-

Jaringan

Keadaan Aset Jaringan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1	Jaringan Listrik Lainnya	1	39.679.750
2	Jaringan Transmisi Tegang Diatas 300 kVA	1	84.488.220
Jumlah		2	124.167.970

Aset Tetap Lainnya

Keadaan Gedung dan Bangunan Pengadilan Tinggi Jayapura Per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas (unit)	Nilai (Rp)
1.	Monografi	12	12.973.451
2.	Buku Lainnya	38	3.766.125
Jumlah		50	16.739.576

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI Mendukung Peradilan Moderen

1. Implementasi e-Court

Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengelola teknologi informasi dibidang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik (e-Court) untuk perkara perdata guna mendukung terwujudnya peradilan moderen dan agung. Implementasi e-Court pertama kali dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 yang saat itu masih berlaku di lingkungan peradilan umum. Pada awalnya e-Court di Pengadilan Tinggi hanya menangani:

1. Melakukan penginputan data advokat yang telah diambil sumpah kedalam aplikasi *e-Court*.
2. Melakukan verifikasi terhadap berita acara penyumpahan.

Data pendaftaran advokat pada aplikasi e-Court yang dikelola oleh Kepaniteraan Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sebagai berikut :

Jumlah Akun yang Mendaftar	Jumlah Akun yang Terverifikasi	Jumlah Akun yang belum Terverifikasi (Data Invalid)
524	496	28

Dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan SK KMA No. 129/KMA/A/VIII/2019 Tgl. 13 Agustus 2019 Jo SK KMA No. 271/KMA/SK/XII/2019 Tgl. 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan PK secara elektronik tugas Pengadilan Tinggi tidak terbatas pada verifikasi Advokat saja, melainkan menangani perkara e-Court ditingkat banding. Para pengguna e-Court bukan hanya pengguna terdaftar Advokat saja melainkan juga pengguna lain seperti Kuasa dari Lembaga atau Badan, Perseorangan, maupun Jaksa Pengacara Negara;.

PERMA No. 1 Tahun 2019 diperbaharui lagi dengan PERMA No. 7 Tahun 2022 dan SK KMA No. 363/SK/XII/2022 sebagai Juklaknya serta SEMA No. 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat, yang diharapkan meningkatkan pelaksanaan persidangan e-Court/ e-Litigasi di pengadilan baik secara penuh maupun secara **hybrid**.

Data perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri yang didaftarkan dan disidangkan melalui e-Court, termasuk perkara perdata permohonan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Pengadilan Negeri	Jumlah Perkara e-Court	Keterangan
PN Jayapura	885 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Merauke	352 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Nabire	214 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Wamena	85 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Kota Timika	31 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Biak	57 Perkara	No Perkara terdaftar
PN Serui	57 Perkara	No Perkara terdaftar
Jumlah	1681 Perkara	

Perkara banding yang diajukan secara e-Court di Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2023 masih rendah sekitar 15% dibanding total perkara yang diajukan secara manual. Hal ini menjadi perhatian dari pimpinan Pengadilan Tinggi untuk mendorong Pengadilan Negeri melakukan proses persidangan secara e-litigasi dan melaksanakan pengajuan upaya banding melalui e-Court.

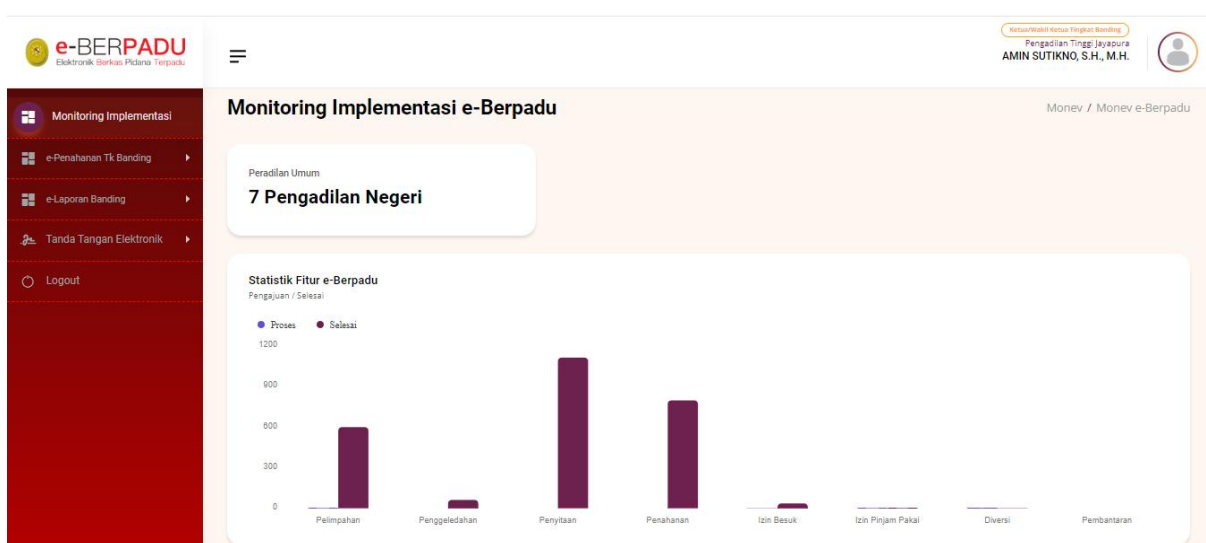
Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Biak, salah satu satker di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura pada Tahun 2023 telah berhasil meraih penghargaan Peringkat II Lomba e-Litigasi Mahkamah Agung R.I Tahun 2023 yang disampaikan dalam acara Penganugerahan Abinaya Upangga Wisesa Mahkamah Agung RI Tanggal 11-12 Desember 2023 di Jember Jawa Timur.

2. Implementasi e-Berpadu

e-Berpadu atau Elektronik Berkas Pidana Terpadu yaitu aplikasi untuk pengiriman berkas perkara pidana secara terpadu dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai persidangan secara elektronik yang terintegrasi dengan

Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayahnya. Selain untuk pengiriman berkas, aplikasi e-Berpadu juga memiliki fitur-fitur lain seperti untuk pengajuan permohonan penetapan penahanan ditingkat pertama maupun tingkat banding, ijin penyitaan, ijin penggeledahan, ijin bezuk tahanan dll yang terintegrasi ini sangat bermanfaat untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan pengadilan. Dasar hukum e-Berpadu adalah PERMA No. 8 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik jo. SK KMA No. 365/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Tinggi Jayapura telah mengimplementasikan e-Berpadu dan melakukan monitoring atas pelaksanaan e-Berpadu di setiap satuan kerja sebagaimana terlihat dalam chart di bawah ini:



3. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah bagian dari Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yaitu aplikasi dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding dan Kasasi di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkara oleh aparaturnya pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan

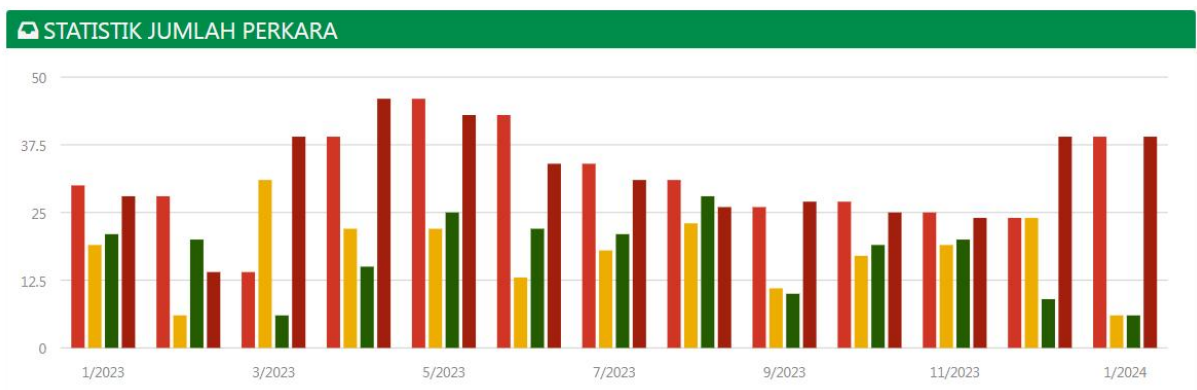
jaringan internet, fitur informasi perkara di aplikasi SIPP ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.

Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara *online*.

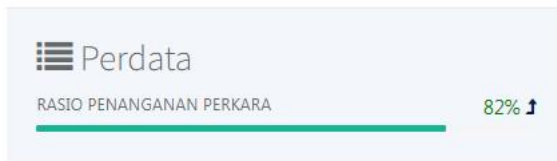
Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disinkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu *Update* maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan sinkronisasi setidaknya – tidaknya sekali dalam sehari.

Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan sejak tahun 2016 dan terus diperbarui fitur – fiturnya, yang saat ini sudah sampai pada Versi v4.1.1 yang telah memuat fitur e-Court yang memudahkan masyarakat pencari keadilan memperoleh informasi keadaan perkaranya.

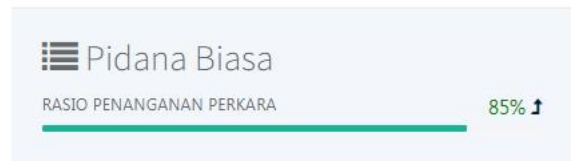
Pengadilan Tinggi Jayapura telah menggunakan SIPP untuk melaksanakan dan memonitor kinerja utamanya yang dapat dimonitor kinerjanya pada grafik berikut:



Data penanganan perkara per tanggal 31 Desember 2023



1	Belum Proses	99
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
2	Sisa Perkara	17
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
3	Masuk Perkara	78
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
4	Putus Perkara	78
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
5	Sisa Akhir Perkara	17
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		



1	Belum Proses	137
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
2	Sisa Perkara	13
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
3	Masuk Perkara	135
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
4	Putus Perkara	126
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
5	Sisa Akhir Perkara	22
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		



1	Belum Proses	4
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
2	Sisa Perkara	-
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
3	Masuk Perkara	4
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
4	Putus Perkara	4
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
5	Sisa Akhir Perkara	-
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		



1	Belum Proses	11
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
2	Sisa Perkara	-
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2024		
3	Masuk Perkara	8
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
4	Putus Perkara	8
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		
5	Sisa Akhir Perkara	-
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2023		

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi, bahkan Mahkamah Agung telah lebih dahulu merealisasikan jauh sebelum Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Setelah SK 144 ditetapkan, terbit peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan

Informasi Publik yang harus dijadikan pedoman pelayanan informasi oleh seluruh Badan Publik, termasuk Pengadilan. Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. yang saat ini telah diperbaharui dengan **SK KMA Nomor 2-144 /KMA/SK/VIII/ 2022** tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, yang mengatur ulang informasi-informasi yang wajib ditampilkan dan yang tidak boleh ditampilkan atau disamarkan untuk publik.

Pengadilan Tinggi Jayapura setidaknya-tidaknya memiliki 3 (tiga) **media sosial** dalam menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat, baik secara tidak langsung yaitu melalui *website* resmi Pengadilan Tinggi dan media sosial Pengadilan Tinggi Jayapura (**Facebook, Instagram, dan Youtube**) maupun secara langsung yaitu melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang ada pada Pengadilan, yang didukung ketersediaan perangkat berupa *hardware* dan *software* dan tentu saja dengan sumber daya manusia yang baik, disiplin dan terlatih.

a) Perangkat Keras (*Hard Ware*)

Keadaan *hard ware* pendukung IT pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura per 31 Desember 2023 yaitu :

Pengadilan	PC & Laptop	Server	Router	Modem
PT Jayapura	57 Unit	4 Unit	5 Unit	1 Unit
PN Jayapura	90 Unit	2 Unit	1 Unit	6 Unit
PN Merauke	59 Unit	4 Unit	4 Unit	0 Unit
PN Nabire	49 Unit	2 Unit	1 Unit	3 Unit
PN Wamena	57 Unit	2 Unit	3 Unit	1 Unit

PN Kota Timika	47 Unit	3 Unit	1 Unit	0 Unit
PN Biak	36 Unit	2 Unit	10 Unit	3 Unit
PN Serui	56 Unit	1 Unit	5 Unit	0 Unit

b) Perangkat Lunak (*Soft Ware*)

Software yang digunakan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura adalah Microsoft Office 2010, 2016, 2019, Office 360 sedangkan untuk system operasinya adalah windows XP, windows 7, dan Windows 10. Untuk menangkal virus menggunakan antivirus yang beragam mulai Smadav, Norton, Kaspersky, PCMav, dll.

c) Jaringan Internet (*Internet Connection*)

Jaringan internet yang telah terkoneksi pada Pengadilan Tinggi Jayapura yaitu Astinet dengan *bandwidth 20 mbps* dan Indihome dengan *bandwidth 100 mbps* yang di koneksikan ke tiap bagian dalam ruangan dengan menggunakan wireless (WiFi) dan kabel (LAN). Sedangkan jaringan internet pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura pada umumnya menggunakan Astinet dan Indihome dengan kapasitas *bandwidth* rata-rata 2 – 10 *mbps*, namun untuk pengadilan di wilayah tertentu seperti PN Wamena menggunakan jaringan provider local yang terkoneksi dengan infrastruktur Palapa Ring Timur (Palapa Timur Telematika).

d) Website

Pengadilan Tinggi Jayapura berupaya memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Keterbukaan Informasi Di Pengadilan serta Surat dari Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI

No. 362/DJU/HM02.3/4/2015 tanggal 16 April 2015 perihal Standarisasi Website Pengadilan. Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dengan demikian website Pengadilan Tinggi Jayapura telah memenuhi aksesibilitas bagi masyarakat Difable. Sehingga seluruh halaman website dapat diakses dan dibaca oleh masyarakat yang berkebutuhan khusus dengan menggunakan perangkat lunak “screen reader” (pembaca layar). Selain itu tata letak website telah memenuhi Standar WAI ARIA (Accessible Rich Internet Application) atau aplikasi internet untuk aksesibilitas yang memastikan aksesibilitas penuh bagi para pengguna website.

Dengan terselesaikannya penyesuaian standarisasi website ini, diharapkan lebih besar manfaatnya untuk transparansi, peningkatan mutu pelayanan informasi publik khususnya informasi tentang proses peradilan, jadwal sidang, publikasi putusan, sarana dan prasarana serta informasi lain lain yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang mencari keadilan (*justiciabelen*). Namun, dalam pengembangan ke depannya, website tersebut perlu dikritisi dan diberikan saran yang konstruktif.

➤ Website resmi dan email Pengadilan Tinggi Jayapura dan Satuan Kerja:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1) Pengadilan Tinggi Jayapura | : pt-jayapura.go.id |
| Email | : ptjayapura@yahoo.co.id |
| 2) Pengadilan Negeri Jayapura | : pn-jayapura.go.id |
| Email | : pnjayapura@yahoo.co.id |
| 3) Pengadilan Negeri Biak | : pn-biak.go.id |
| Email | : pnbiak@gmail.com |
| 4) Pengadilan Negeri Nabire | : pn-nabire.go.id |
| Email | : pn.nabire@yahoo.co.id |
| 5) Pengadilan Negeri Merauke | : pn-merauke.net |
| Email | : pn_merauke@yahoo.co.id |
| 6) Pengadilan Negeri Kota Timika | : pn-timikakota.go.id |
| Email | : pnkotatimika@yahoo.co.id |
| 7) Pengadilan Negeri Serui | : pn-serui.go.id |
| Email | : pn.serui@yahoo.co.id |
| 8) Pengadilan Negeri Wamena | : pn-wamena.go.id |
| Email | : pnwamena.papua@gmail.com |

➤ Sistem Informasi Penelusuran Perkara/SIPP Satuan Kerja:

- 1) Pengadilan Negeri Jayapura : sipp.pn-jayapura.go.id
- 2) Pengadilan Negeri Biak : sipp.pn-biak.go.id
- 3) Pengadilan Negeri Nabire : sipp.pn-nabire.go.id
- 4) Pengadilan Negeri Merauke : sipp.pn-merauke.net
- 5) Pengadilan Negeri Kota Timika : sipp.pn-timikakota.go.id
- 6) Pengadilan Negeri Serui : sipp.pn-serui.go.id
- 7) Pengadilan Negeri Wamena : sipp.pn-wamena.go.id

e) Publikasi Perkara (One Day Publish)

Untuk mendorong terwujudnya Badan Peradilan yang Agung, Pengadilan Tinggi Jayapura telah berbenah dalam Teknologi Informasi (TI) sebagai salah satu prioritas perubahan yang diharapkan dapat memiliki manajemen informasi yang menjamin keterbukaan informasi, akuntabilitas dan transparansi serta menjadi organisasi modern yang berbasis teknologi informasi terpadu.

Pengadilan Tinggi Jayapura menetapkan setiap perkara yang telah putus di Pengadilan Tinggi Jayapura langsung di upload di direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga public dapat melihat putusan perkara yang ada di Pengadilan Tinggi Jayapura. Dalam rangka menyediakan informasi perkara kepada masyarakat telah tersedia aplikasi SIPP-web yang dapat diakses oleh masyarakat pada laman web banding.mahkamahagung.go.id Data pada aplikasi diperbaharui setiap hari, sehingga setiap perubahan tahap yang telah diinput dalam aplikasi dapat diakses oleh masyarakat dan setiap harinya dilakukan sinkronisasi.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Dimulai dari Tahun 2016, Pengadilan Tinggi Jayapura menyelenggarakan Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) yang bertujuan melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam Standar Pelayanan Publik dan kinerja aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura. Perubahan yang dilakukan baik didalam maupun luar gedung Pengadilan Tinggi Jayapura serta inovasi-inovasi pelayanan publik yang dijalankan bertolak dari komitmen pimpinan dan seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura untuk mendukung visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia terutama dalam hal mutu pelayanan pengadilan.

Dengan kerja keras dan semangat yang tinggi dari pimpinan dan jajarannya, Pengadilan Tinggi Jayapura berhasil memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dengan predikat “A” dari Dirjen Badan Peradilan Umum, dengan Nomor: 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus dan I A Tahun 2022

Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar pelayanan publik dan lebih meningkatkan lagi dimasa mendatang baik dalam hal pelayanan publik maupun kinerja aparatur didalamnya.

Pengadilan Tinggi Jayapura juga berkomitmen membina dan memotivasi jajaran Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya untuk memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) sesuai program Dirjen Badan Peradilan Umum. Pimpinan dan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu telah melakukan sosialisasi dan pembekalan kepada semua jajaran aparatur di Pengadilan Tinggi Jayapura dan di Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya serta memberikan pelatihan Assesor kepada Hakim Tinggi Pengawas sehingga dapat meningkatkan kualitas Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.

Berdasarkan hasil surveilan yang dilakukan Tim APM Dirjen Badan Peradilan Umum dan Tim APM Pengadilan Tinggi Jayapura tahun 2022, berikut daftar Pengadilan Negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura yang memperoleh sertifikat Akreditasi :

<i>Satker</i>	<i>Akreditasi</i>
<i>PN JAYAPURA</i>	“ A Excellent “
<i>PN WAMENA</i>	“ A Excellent “
<i>PN MERAUKE</i>	“ A Excellent “
<i>PN BIAK</i>	“ A Excellent “
<i>PN NABIRE</i>	“ A Excellent “
<i>PN SERUI</i>	“ A Excellent “
<i>PN TIMIKA</i>	“ A Excellent “

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, Pengadilan Tinggi Jayapura bertekad untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur dan terjangkau, sehingga perlu dilakukan perubahan sistem pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu.

PTSP bertujuan untuk mewujudkan pelayanan yang sesuai standar yang telah ditetapkan serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan bebas KKN, serta dilaksanakan dengan prinsip keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinasi, akuntabilitas, dan aksesibilitas sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02/3/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Dengan adanya PTSP masyarakat dan pencari keadilan dapat memperoleh informasi hanya dengan mendatangi meja

pelayanan PTSP yang sudah terintegrasi dengan seluruh bagian, sehingga petugas PTSP dapat memberikan pelayanan secara cepat.

Petugas PTSP pada PT Jayapura terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Petugas Kepaniteraan dan Petugas Kesekretariatan.



Untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan dalam PTSP, Pengadilan Tinggi Jayapura beserta seluruh satuan kerja dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura memanfaatkan fasilitas aplikasi PTSP. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang pada awalnya diperuntukkan untuk PTSP pada Pengadilan Negeri saja, namun mengingat fitur dan layanan dalam aplikasi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan kewenangan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan penyesuaian aplikasi sehingga dapat membantu proses pelayanan sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawab PTSP pada Pengadilan Tinggi.

Aplikasi PTSP digunakan untuk pencatatan surat masuk, surat keluar, buku tamu, surat keterangan online, dan sebagainya.

Tampilan aplikasi PTSP PT Jayapura dan beberapa Pengadilan Negeri dalam wilayah PT Jayapura sebagai berikut :

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Standar pelayanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi Jayapura ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor W30-U/03 /KPT/SK/4/2018 tanggal 9 April 2018 sebagai Standar Pelayanan Pengadilan dalam mengoperasionalkan tugas dan fungsi selaku kawal depan Mahkamah Agung di wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat. Standar Pelayanan Pengadilan juga dipandang sebagai bagian dari reformasi birokrasi sekaligus sebagai alat kontrol terhadap aparatur Pengadilan serta percepatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan peningkatan kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan yang di berikan oleh aparat badan peradilan.

Selain pelayanan kepada para pencari keadilan, Pengadilan Tinggi Jayapura juga melakukan inovasi dalam pelayanan kepada aparatur pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

1. Command Center

Sebagai upaya peningkatan pengawasan dan alih ilmu pengetahuan (*transferknowledge*) dalam rangka perbaikan kualitas kinerja dan pelayanan berbasis teknologi informasi terintegrasi, Pengadilan Tinggi Jayapura telah membangun fasilitas Command Center dengan pemanfaatan sebagai berikut:

- ✓ Melakukan monitoring pelaksanaan pelayanan publik di Pengadilan Negeri melalui CCTV secara realtime
- ✓ Melakukan pembinaan & pengawasan terhadap jalannya kinerja pelayanan publik di Pengadilan Negeri secara *virtual*
- ✓ Melakukan rapat/pertemuan/sosialisasi/pelatihan secara daring dengan Mahkamah Agung dan instansi terkait
- ✓ Monitoring data kinerja melalui aplikasi-aplikasi pendukung secara online:



2. Sport Center

Dengan menyediakan sarana olahraga dan berolahraga secara rutin dapat meningkatkan produktifitas kerja sehari-hari *Mens Sana In Corpore Sano* bagi seluruh aparatur pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

Adapun manfaat dari fasilitas ini adalah:

- ✓ Membantu mengelola stres, memberikan efek relaksasi, meningkatkan mood, serta menurunkan risiko depresi sehingga tidak mempengaruhi produktifitas kerja sehari-hari
- ✓ Memberikan energy untuk beraktifitas, stamina cukup, suasana hati yang positif adalah sumber energi untuk menjalankan pekerjaan dengan produktif.

- ✓ Meningkatkan kinerja otak, menjadi lebih fokus, teliti dan produktif dalam menjalankan pekerjaan
- ✓ Menurunkan resiko penyakit, meminimalisir penurunan produktifitas kerja



3. Aplikasi SIMULAN

Proses Usulan Kepegawaian yang selama ini dilakukan secara manual oleh bagian Kepegawaian Pengadilan Tinggi Jayapura, kini dapat dilakukan secara digital dan online dan dimanfaatkan oleh para pengguna layanan (aparatur Peradilan Umum) di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan mengajukan usulan kepegawaian dengan lebih mudah, efisien dan efektif ke Pengadilan Tinggi Jayapura melalui layanan : SISTEM INFORMASI DAN MONITORING USULAN KEPEGAWAIAN (SIMULAN) dapat diakses melalui website pt jayapura dan alamat situs : <https://usulan.pt-jayapura.info/>

SIMULAN merupakan suatu bentuk inovasi dibidang kepegawaian yang berbentuk aplikasi layanan administrasi usulan kepegawaian meliputi kepangkatan, jabatan, mutasi, pensiun, pemberhentian dan kartu pegawai (karpeg,karis/karsu) yang berorientasi kepada pemberian informasi dan monitoring layanan usulan kepegawaian secara digital dan online dari Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai pihak yang menerima dan melakukan proses usulan, yang dapat diakses melalui internet baik melalui jaringan LAN

(*Local Area Network*) maupun jaringan nirkabel dengan sarana komputer, laptop maupun smartphone.

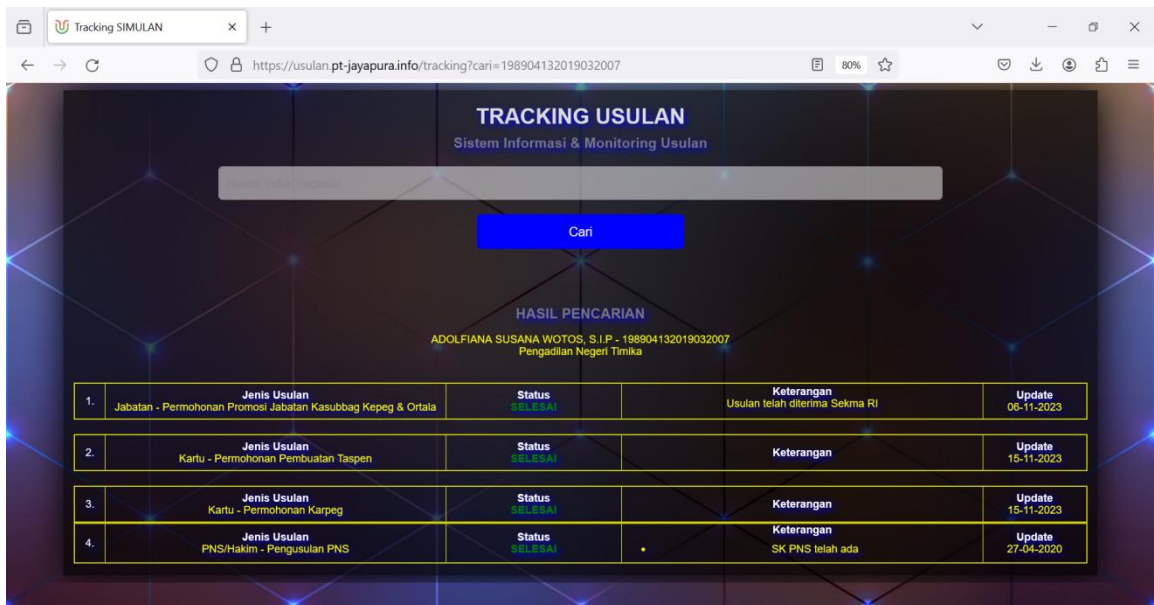
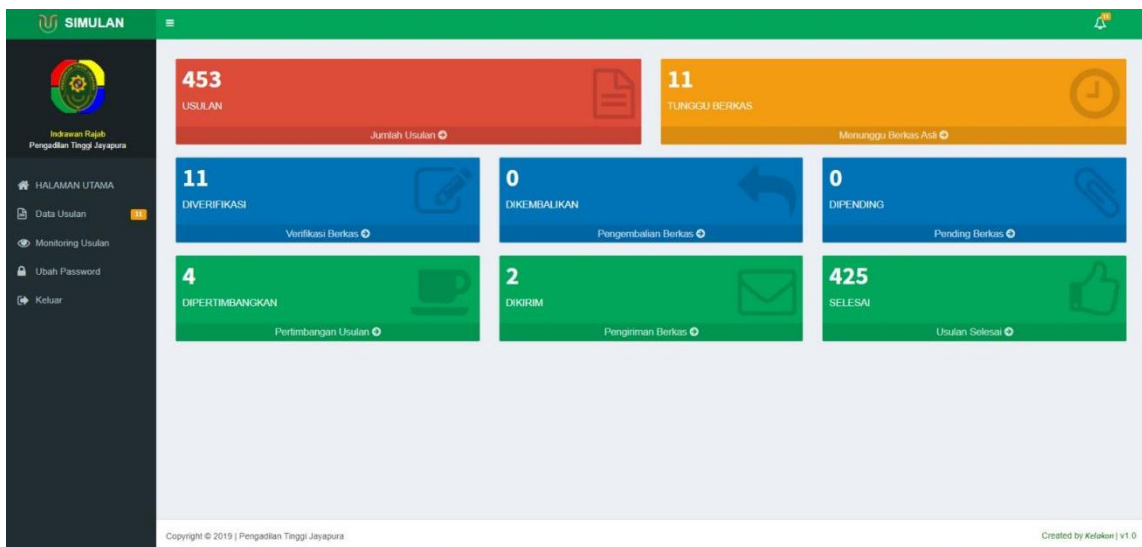
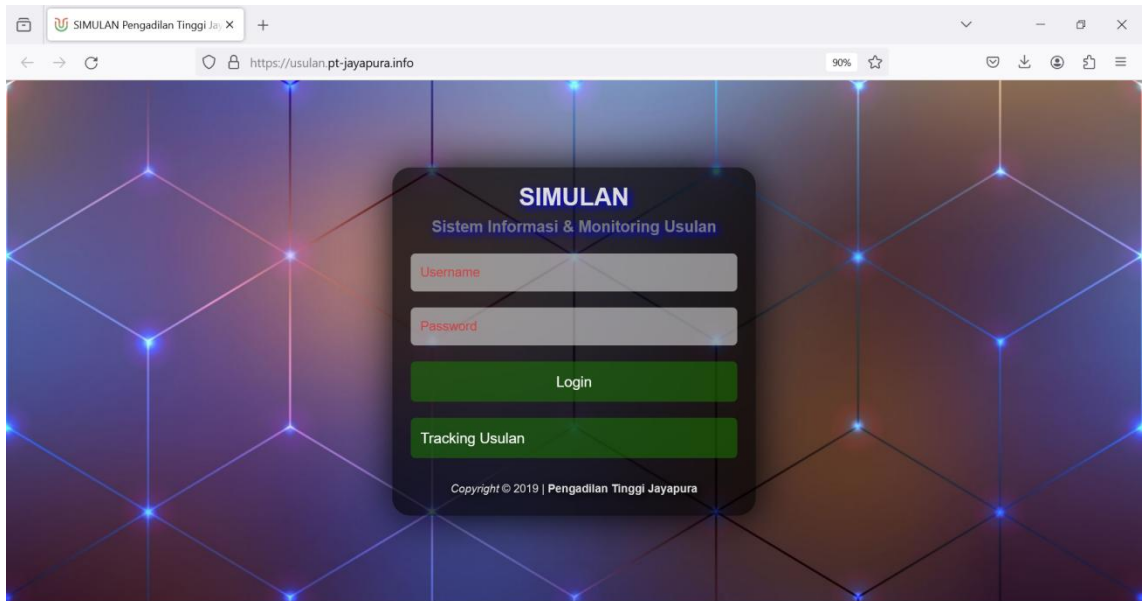
Aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian dikelola oleh Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Jayapura selaku pemberi layanan di bidang kepegawaian untuk seluruh aparaturnya Pengadilan Tinggi Jayapura dan aparaturnya Pengadilan Negeri di Provinsi Papua dan Papua Barat selaku pengguna layanan dan Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana Pengadilan Negeri selaku administrator Satker.

Beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi ini antara lain adalah:

1. Registrasi usulan yang diajukan
2. Proses usulan yang terdiri dari : verifikasi, pertimbangan, pengiriman / penerusan usulan
3. Laporan proses usulan
4. Informasi proses usulan
5. Monitoring proses usulan

Dengan adanya program aplikasi Informasi dan Monitoring Usulan Kepegawaian ini, diharapkan kebutuhan informasi dan monitoring proses usulan kepegawaian dapat terlayani dengan cepat, akurat dan transparan secara digital dan online yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap administrator Satker yaitu petugas sub bagian Kepegawaian pada satuan kerja masing - masing melalui komputer, laptop maupun smartphone dimana saja dan kapan saja dengan memanfaatkan jaringan internet dan tentunya akan sangat mendukung kinerja Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) yang telah dikembangkan oleh Mahkamah Agung RI .

Berikut beberapa tampilan dari Aplikasi SIMULAN :



4. Aplikasi SIMONTI

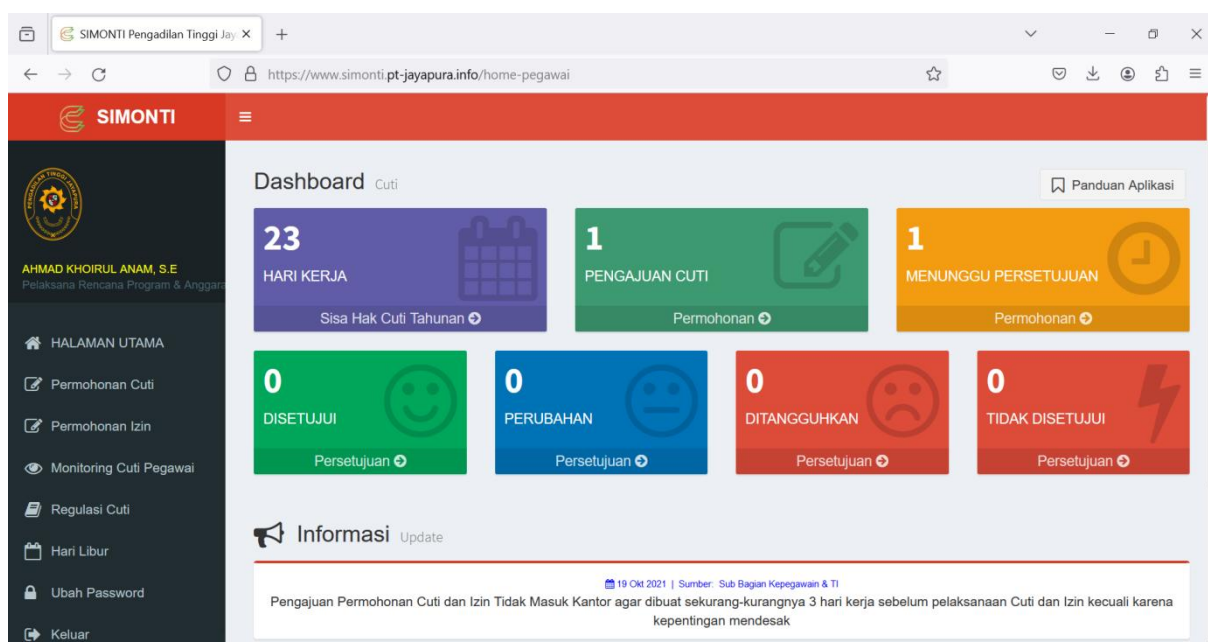
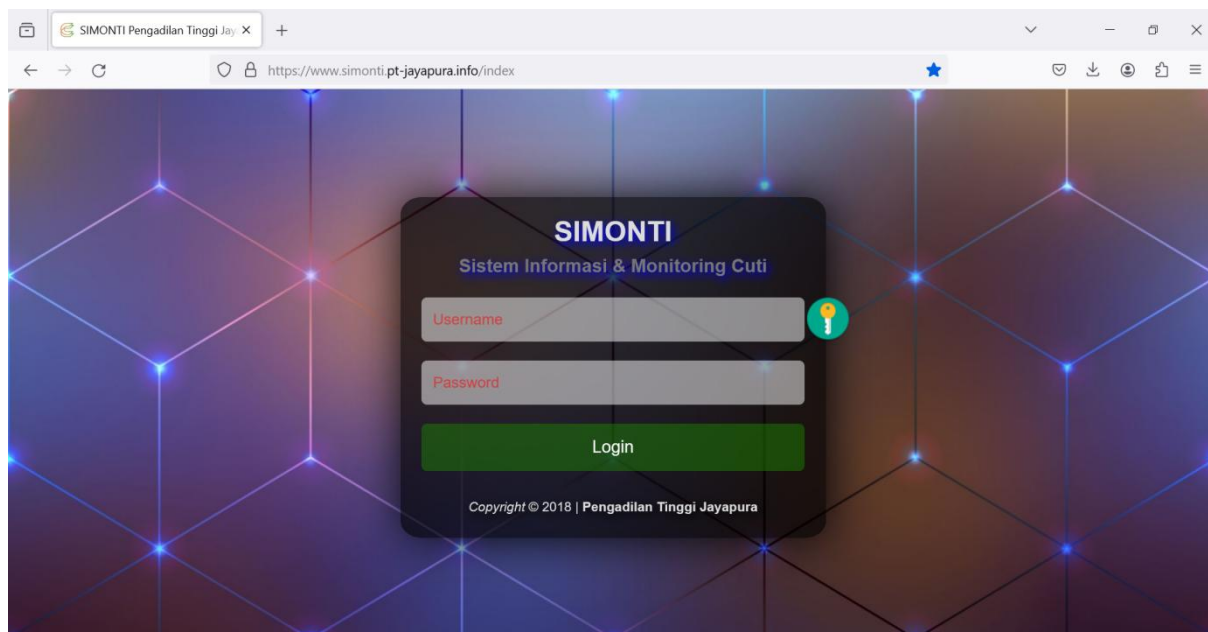
SISTEM INFORMASI CUTI PEGAWAI merupakan portal informasi dan pengelolaan administrasi cuti bagi Hakim dan Pegawai pada Pengadilan Tinggi Jayapura serta Ketua Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura, dapat diakses secara online melalui website PT Jayapura atau melalui alamat situs <https://cuti.pt-jayapura.info/>

Pengelolaan administrasi cuti dimaksud adalah proses pelaksanaan cuti mulai dari pengajuan permohonan cuti sampai dengan penyampaian dokumen cuti setelah mendapatkan catatan/pertimbangan/persetujuan dari pejabat yang berwenang memberikan Catatan Cuti, Pertimbangan Cuti dan Persetujuan Cuti.

TUJUAN pemanfaatan Sistem Informasi & Monitoring Cuti ini adalah

- Memberikan Informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Sisa Hak Cuti Tahunan 2 (dua) tahun sebelumnya (T-2), 1 (satu) tahun sebelumnya (T-1) dan tahun berjalan (Tahun ini)
 - Informasi jumlah pengajuan permohonan cuti dan informasi proses persetujuan cuti (Disetujui/Perubahan/Ditangguhkan/Ditolak)
 - Informasi terkait regulasi atau ketentuan tentang cuti yang berlaku
 - Informasi tentang hari-hari libur, baik Libur Nasional, Libur Khusus Papua dan Cuti Bersama
- Mempermudah proses pengajuan permohonan cuti dengan formulir standar sesuai ketentuan
- Mempermudah panyampaian dan akses untuk mendapatkan dokumen cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pencatatan dan monitoring cuti secara elektronik
- Sebagai bentuk pengarsipan dokumen cuti secara elektronik

Berikut beberapa tampilan Aplikasi SIMONTI :



5. Aplikasi SIDOEL

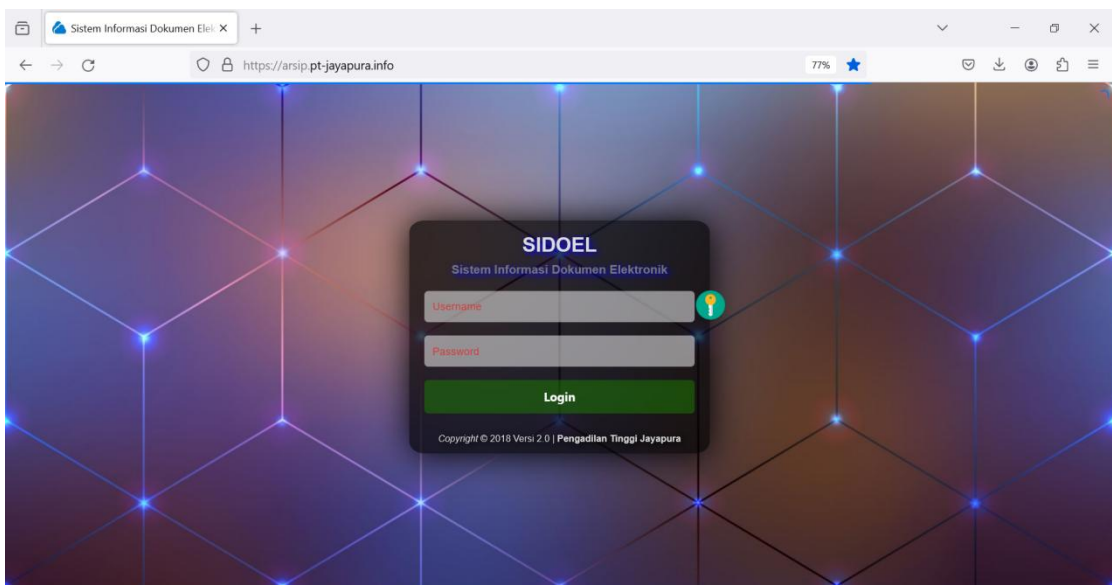
SISTEM INFORMASI DOKUMEN ELEKTRONIK merupakan portal informasi dan pengarsipan dokumen/regulasi secara elektronik baik internal maupun external dalam satu sistem aplikasi yang dapat diakses oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Jayapura, portal aplikasi ini dapat diakses secara online melalui alamat situs <https://sidoel.pt-jayapura.info/>

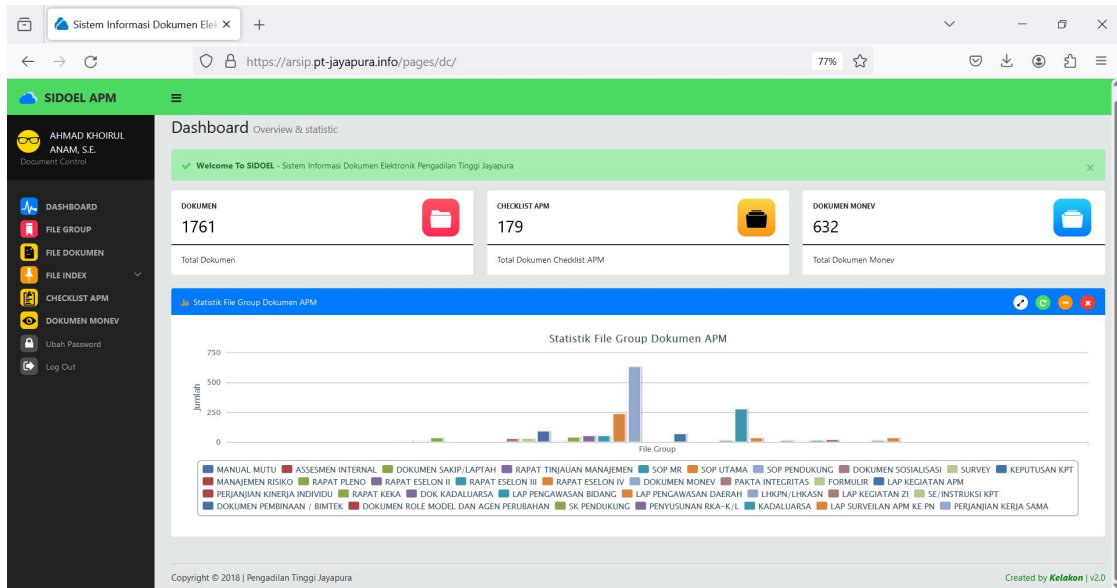
Informasi dan pengarsipan dokumen/regulasi secara elektronik dimaksud mencakup tentang dokumen/regulasi terkait Kebijakan Mahkamah Agung, Kebijakan Pimpinan Pengadilan Tinggi, Dokumentasi APM, Dokumentasi Pembangunan Zona Integritas serta mengakomodir juga terkait dokumen/format/ formulir standar yang digunakan dalam menunjang kinerja pengadilan

TUJUAN pemanfaatan dari aplikasi ini adalah

- Memberikan Informasi terkait hal-hal sebagai berikut:
 - Dokumen Peraturan Mahkamah Agung
 - Dokumen Surat Edaran Mahkamah Agung
 - Kebijakan Mahkamah Agung lainnya (SK, Instruksi, dll)
 - Dokumen Keputusan dan Kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi
 - Kebijakan instansi lain yang terkait dan menunjang kinerja pengadilan
 - Dokumen pendukung dalam Akreditasi Penjaminan Mutu
 - Dokumen pendukung dalam Pembangunan Zona Integritas
- Mempermudah akses informasi regulasi dan kebijakan pendukung kinerja
- Sebagai bentuk pengarsipan dokumen secara elektronik

Berikut beberapa tampilan Aplikasi SIDOEL :





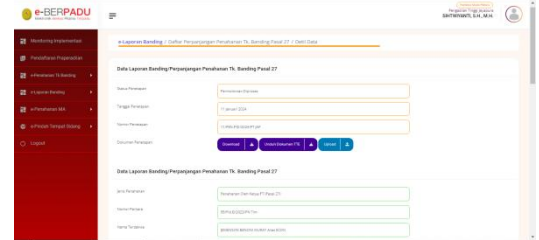
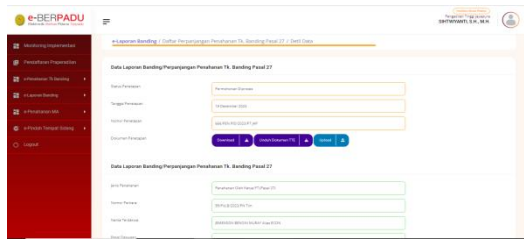
6. e-Berpadu Mooi

Proses penetapan perpanjangan penahanan banding pada aplikasi e-Berpadu hanya untuk memproses penetapan perpanjangan penahanan banding 30 hari (pasal 27 ayat (1) KUHAP) sedangkan untuk memproses perpanjangan penahanan banding 60 hari (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) belum bisa diproses melalui aplikasi e-Berpadu dikarenakan belum ada pilihan/fitur untuk memproses perpanjangan penahanan 60 hari (pasal 27 ayat (2) KUHAP). Oleh karena itu dari bagian kepaniteraan PT Jayapura mencoba memodifikasi aplikasi agar proses perpanjangan penahanan banding 60 hari (Pasal 27 ayat (2) KUHAP) dapat dilakukan melalui aplikasi e-Berpadu.

Berikut beberapa tampilan dari aplikasi e-Berpadu:

The screenshot shows the e-BERPADU application interface with the following table of banding cases:

No	Surat Permohonan	Permohonan	Satker Pengaju / Nomor Perkara	Lama Proses	Status	Detil
1	W30-U3/HK2.1/XII/2023 19 Desember 2023	Hakim PT Jenis Tahanan : Tahanan Rutan Habis Masa Tahanan : 13 Februari 2024	PERPANJANGAN PENAHAN BANDING 73/Pid.Sus/2023/PN Blk STEVEN YACOB RAIWAKI	2	Penetapan	
2	1283/KPN.W30-U7/HK2.1/XII/2023 18 Desember 2023	Hakim PT Jenis Tahanan : Tahanan Rutan Habis Masa Tahanan : 12 Januari 2024	PERPANJANGAN PENAHAN BANDING 99/Pid.Br/2023/PN Tim JEMENSON BENONI MURAY Alias ECON	25	Penetapan	
3	465/PAN.02.W30-U4/HK2.1/XII/2023 18 Desember 2023	Hakim PT Jenis Tahanan : Tahanan Rutan Habis Masa Tahanan : 17 Januari 2024	PERPANJANGAN PENAHAN BANDING 68/Pid.Sus/2023/PN Wmn Yan Akla Hubi	25	Penetapan	



Inovasi pelayanan publik yang dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

- PN Jayapura**
- Mesin antrian PTSP, untuk memudahkan layanan pada PTSP yang lebih baik kepada pencari keadilan.
 - Mesin EDC untuk mendukung e-Court dan survey IKM dan IPK.
 - Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.
 - Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.
 - Chatbot WA PN Jayapura.
 - Brosur Braille Persyaratan Perkara Perdata dan Hukum dan Petunjuk Eraterang.
 - Kartu Layanan Prioritas.

- PN Kota Timika**
- Audio Peringatan Anti Gratifikasi.
 - viaMENO, aplikasi menjawab otomatis lewat aplikasi whatsapp.
 - Monitor Jadwal Sidang Perkara.
 - Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.
 - Eraterang, media elektronik dalam memberikan pelayanan permohonan Surat Keterangan.

- PN Merauke**
- e-Service, pelayanan yang dilakukan PN Merauke menggunakan teknologi informasi / media sosial.
 - Simetaline (Surat Ijin Mengunjungi Tahanan Online), dapat diakses keluarga/kerabat terdakwa yang ingin mengunjungi secara daring.
 - e-Survey, aplikasi untuk mengetahui penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan PN Merauke dan penilaian Indeks Persepsi Korupsi (IPK).
 - e-Court Corner: Masuk Distrik Pojok informasi tentang e-Court para masyarakat dapat mengetahui informasi tentang e-Court di Kantor Distrik Ulilin, Jagebob, Elikobel, Muting dan Animha
 - Pandu satelit pemeriksaan setempat.
 - e-SAPPITA (Elektronik Salinan Putusan Pidana dan Perdata).

PN Nabire

- E-Survey, Survey Indeks Persepsi Korupsi PN Nabire.
- Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website.
- Elektronik Surat Izin Besuk pada Pengadilan Negeri Nabire
- SPT (Sistem Pidana Terintegrasi), sistem peradilan pidana yang terintegrasi pada Pengadilan Negeri Nabire.
- Antrian PTSP Elektronik.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

PN Serui

- Audio Gratifikasi, diperdengarkan untuk semua pengunjung PN Serui.
- Eraterang, untuk keperluan surat keterangan dari Pengadilan Negeri Serui.
- VAIS (Virtual Assistant Information Sistem), menampilkan jadwal informasi sidang, disposisi surat PTSP, mengecek tunggakan pada aplikasi MIS melalui fitur whatsapp.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court.

PN Biak

- Aplikasi Pemanggilan Sidang, pelayanan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, layaknya panggilan nasabah bank.
- E-Tilang, pelayanan kepada masyarakat untuk menemukan informasi denda tilang yang akan dibayarkan di Kantor Kejaksaan.
- Insos Tivani (Informasi Seputar Aktivitas Pengadilan Negeri), layanan chat bot virtual seputar informasi mengenai PN Biak.
- Antrian Layanan, membantu nomor antrian layanan.
- Napi Byak, layanan pemberi informasi Pengadilan Negeri Biak.
- Desk Priority, buku cetak huruf braille.
- Studio Mini Fiat Justitia (Podcast).

PN Wamena

- Eraterang, aplikasi surat keterangan elektronik berbasis website pada Pengadilan Negeri Wamena.
- Pojok e-Court, pojok informasi tentang e-Court pada Pengadilan Negeri Wamena.
- Lapago, (Layanan Pengadilan Go Mobile), aplikasi virtual asisten chatbot via WA.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

1. Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat pengendalian secara terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif, agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan pengawasan melekat, wewenang dan tanggung jawab pengawasan di lingkungan Peradilan Tingkat Banding berada pada :

- Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding
- Seluruh Pejabat Kepaniteraan
- Seluruh Pejabat Struktural di lingkungan Pengadilan Tingkat Banding

Setiap atasan langsung wajib:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik di dalam maupun di luar kedinasan secara terus menerus.
- b. Mengupayakan tersedianya sarana atau sistem kerja berdasarkan kewenangan yang dimiliki sehingga pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Mahkamah Agung RI tentang pengawasan melekat secara lengkap tertuang dalam Perma 8 tahun 2016.

2. Pengawasan Bidang

Guna meningkatkan profesionalisme tiap bidang dan terwujudnya pelayanan yang bersih dan transparan, maka Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas dan Pembinaan Bidang melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/5/KPT/SK/1/2023 tanggal 5

Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Bidang, yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Bidang Pengawasan	Hakim Tinggi	Ket
1	Kepaniteraan Perdata	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - TIARES SIRAIT, S.H., M.H.	
2	Kepaniteraan Pidana	- BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.	
3	Kepaniteraan Khusus Tipikor	- Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H. - Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H.	
5	Kepaniteraan Hukum	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H.	
6	Sub Bagian Kepegawaian dan IT	- ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. - ARI WIDODO, S.H.	
7	Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	- BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	
8	Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	- ARI WIDODO, S.H. - SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.	
9	Sub Bagian Tata Usaha dan Tumah Tangga	- SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. - TIARES SIRAIT, S.H., M.H.	

3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Jayapura terhadap pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan membentuk Tim Pengawas Daerah. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura telah membentuk Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Nomor : W30-U/4/KPT/SK/1/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim

Tinggi Pengawas Daerah yang susunan hakim pengawasnya adalah sebagai berikut:

No	Hakim Tinggi Pengawas Daerah	Daerah Pengawasan	Ket.
1	- BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H. - Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. - Dr. PETRUS P. MATURBONGS, S.H., M.H. - Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.H. - Dr. ABDUR RAZAK, S.H., M.H.	PN JAYAPURA	
2	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - TIARES SIRAIT, S.H., M.H.	PN BIAK	
3	- ARI WIDODO, S.H. - TIARES SIRAIT, S.H., M.H.	PN MERAUKE	
4	- PALUKO HUTAGALUNG, S.H., M.H. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	PN KOTA TIMIKA	
5	- Dr. LISFER BERUTU, S.H., M.H. - SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H.	PN WAMENA	
6	- BONNY SANGGAH, S.H., M.Hum. - ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.	PN NABIRE	
7	- SIGIT PANGUDIANTO, S.H., M.H. - ARI WIDODO, S.H.	PN SERUI	

Pengawasan ke Pengadilan Negeri di Wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura secara rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung dan pengawasan jarak jauh yaitu dengan bentuk pengamatan dari dekat, dengan cara melakukan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku dan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui teleconference/zoom meeting untuk pengawasan jarak jauh.

Pengawasan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, sedangkan pengawasan khusus dilaksanakan berdasarkan laporan dari masyarakat

dan juga hasil dari temuan dalam Laporan Bulanan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang kepaniteraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

- a. Memeriksa program kerja.
- b. Menilai dan mengevaluasi hasil kegiatan/ pelaksanaan program kerja.
- c. Memberikan saran-saran untuk perbaikan.
- d. Melaporkan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura.
- e. Merekomendasikan kepada Pimpinan Pengadilan Tinggi Jayapura atau Pejabat yang berkompeten terhadap temuan-temuan yang



memerlukan

tindak lanjut.

Fasilitas Command Center diharapkan dapat menjawab tantangan “jarak jauh” karena letak geografis Pengadilan

Negeri di wilayah Papua dan Papua Barat yang hampir seluruhnya harus dijangkau dengan menggunakan pesawat dan biaya tinggi serta resiko tinggi sehingga pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengawasan dapat dilakukan dengan biaya ringan, intensitas dapat meningkat sekaligus manajemen resiko dapat diterapkan karena melalui beberapa sistem Aplikasi Pengadilan Tinggi Jayapura sewaktu-waktu (realtime) dapat memonitoring serta mengevaluasi kinerja peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura serta memudahkan koordinasi secara jarak jauh antara Pengadilan Tinggi Jayapura dengan pengadilan negeri di wilayah hukumnya.



Dalam hubungannya dengan pembangunan Zona Integritas, fasilitas ini dapat menghindarkan penyimpangan penggunaan anggaran pengawasan dan pembinaan yang sekaligus merupakan inovasi dalam membangun budaya kerja yang baru.

Pengawasan yang bersifat reguler/ rutin pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan dengan maksud untuk :

- a) Memperoleh informasi apakah penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas umum peradilan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- b) Memperoleh umpan balik bagi kebijaksanaan perencanaan dan pelaksanaan tugas-tugas peradilan.
- c) Mencegah terjadinya penyimpangan, maladministrasi dan ketidakefisienan penyelenggaraan peradilan.
- d) Menilai kinerja aparat peradilan.
- e) Identifikasi dan inventarisasi kendala dan permasalahan sehingga memudahkan evaluasi dan pemecahan masalah (solusi).

B. EVALUASI

1. Pengawasan Melekat

Pengadilan Tinggi Jayapura dan Pengadilan Negeri sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jayapura melakukan rapat secara berjenjang minimal 1 (satu) bulan sekali dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pada

setiap bagian agar tugas dan fungsi masing-masing bagian berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan organisasi.

Atasan langsung pada masing-masing bagian wajib menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan bawahan tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.

Atasan langsung merekomendasikan tindak lanjut kepada atasannya secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan di luar kewenangannya.

Hasil rapat berjenjang akan dibawa ke rapat rutin bulanan/pleno yang akan membahas berbagai persoalan dan mengevaluasi hasil temuan dibagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Terhadap hasil evaluasi tersebut, kemudian dilakukan perbaikan secara komprehensif dan menyeluruh oleh masing-masing bidang.

2. Pengawasan Bidang

Hakim Tinggi Pengawas yang telah ditunjuk untuk melaksanakan tugas pengawasan pada bidang/bagian yang ada melakukan monitoring dan evaluasi kinerja terkait pelaksanaan tugas pokok dan tanggung jawab bidang/bagian masing-masing secara periodik minimal 1 (satu) bulan sekali dengan menghadiri rapat berjenjang setingkat eselon IV yang dilakukan setiap bulan.

Laporan hasil pengawasan bidang/bagian kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku koordinator pengawasan pada Pengadilan Tinggi Jayapura.

3. Pengawasan ke Pengadilan Negeri (Pengawasan Daerah)

Pengawasan rutin/reguler ke Pengadilan Negeri bertujuan untuk mengetahui rencana-rencana kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Pengadilan Tinggi Jayapura dapat dilaksanakan serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh masing-masing unit kerja.

Hakim Tinggi Pengawas Daerah menyampaikan hasil pengawasan pada Pengadilan Negeri setelah selesai melakukan pengawasan serta membuat laporan hasil pengawasan daerah dan menyampaikan kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura selaku koordinator pengawasan, untuk dibuatkan

resume hasil pengawasan dan selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura.

Hasil pengawasan berupa temuan-temuan atau ketidaksesuaian dari Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura, segera ditindaklanjuti oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan dilakukan evaluasi oleh Tim Pengawas dan Pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Jayapura.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 yang kami susun ini, memberikan gambaran dan kesimpulan mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan kinerja kami dalam pengelolaan Pengadilan Tinggi Jayapura sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara dan administrasi umum pada peradilan umum meliputi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura sudah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya, namun perlu terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan baru dari Mahkamah Agung RI.
2. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial dan Non Teknis baik kualitas maupun kuantitasnya masih perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.
3. Pengawasan Internal terhadap aparaturnya Pengadilan Tinggi Jayapura dan pengawasan terhadap Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah dijalankan dengan tertib namun masih terus dilakukan peningkatan kualitas bagi Para Hakim Pengawas.
4. Pengelolaan Aset pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura telah berjalan dengan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan ketertiban pencatatannya.
5. Pemanfaatan dari Realisasi Anggaran dalam mendukung Pelaksana Tugas Teknis dan Non Teknis Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura cukup baik, namun perlu ditingkatkan terus untuk mendukung perkembangan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru.

B. REKOMENDASI

1. Agar sosialisasi kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru terus menerus ditingkatkan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jayapura.

2. Agar ditingkatkan alokasi pagu anggaran untuk Bimbingan Teknis baik untuk tenaga teknis maupun nonteknis demi peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan penambahan formasi sumber daya manusia (hakim dan pegawai) di wilayah Pengadilan Tinggi Jayapura.
3. Agar pengawasan lebih efektif dan obyektif, maka anggaran untuk pengawasan perlu ditingkatkan.
4. Perlu dilakukan penambahan sumber daya manusia (SDM) untuk pengelolaan aset agar dapat dijalankan sesuai aturan dan mekanisme yang ada.
5. Perlu ditingkatkan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung RI yang baru dan pelaksanaan Tugas Pokok peradilan umum.



PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
NOMOR : 126 /KPT.W30-U/SK/XII/2023

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Agung RI Tahun 2023, maka perlu dilakukan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan pada Pengadilan Tinggi Jayapura;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah RI Nomor:4108/SEK/OT1.6/12/2023 tentang Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, dipandang perlu untuk menunjuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TENTANG PENUNJUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun agar dapat menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Jayapura Tahun 2023 paling lama pada minggu keempat bulan Januari 2024

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura

Pada Tanggal : 20 Desember 2023

KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA



AMIN SUTIKNO

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
NOMOR : 26 /KPT.W30-U/SK/XII/2023
TANGGAL : 20 Desember 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA TAHUN 2024

NO.	JABATAN	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Amin Sutikno, S.H., M.H. NIP. 19600801 198612 1 001	Ketua	Penasehat/ Pelindung
2.	Adrianus Agung Putrantonno, S.H. NIP. 19630611 199212 1 001	Hakim Tinggi	Ketua
3.	Dahlan, S.E., S.H. NIP. 19650513 199303 1 002	Panitera	Sekretaris I
4.	Maulana Musa Sugi Alam, S.H. NIP. 19721021 199303 1 002	Sekretaris	Sekretaris II
5.	Nurmayani, S.E. NIP. 19801210 200502 2 001	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
6.	Herna Dian Prihatiny Napan, S.T. NIP. 19850902 200912 2 004	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
7.	Suyatmi, S.H., M.H. NIP. 19690913 198903 2 002	Panitera Muda Perdata	Anggota
8.	Sihtwiyanti, S.H., M.H. NIP. 19670203 199203 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
9.	Tommy K.I. Medellu, S.H. NIP. 19620817 198303 1 004	Panitera Muda Tipikor	Anggota
10.	Adolf Fordatkossu, S.H. NIP. 19620405 198203 1 003	Panitera Muda Hukum	Anggota
11.	Sihtwiyanti, S.H., M.H. NIP. 19670203 199203 2 001	Panitera Muda Pidana	Anggota
12.	Diana Bian, S.E. NIP. 19670807 199203 2 009	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
13.	Afri Yuhara, S.Kom. NIP. 19780404 200904 1 005	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
14.	Yeny Darmayani, S.Kom. NIP. 19821204 200904 2 003	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI	Anggota
15.	Ahmad Khoirul Anam, S.E. NIP. 19940401 202012 1009	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
16.	Martha Christina Kabes, S.E. NIP. 19940326 202203 2 001	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Anggota
17.	Verla Remi Julia, A.md. A.P. NIP. 19970722 202203 2 017	Pengelola Perkara	Anggota



KETUA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

AMIN SUTIKNO